



LAPORAN TAHUNAN

2022



tifafoundation_id



@TifaFoundation



@tifafoundation



Yayasan Tifa



LAPORAN
TAHUNAN
2022

Y A Y A S A N
TIFA



Ilustrasi cover:
Freepik.com (diolah)

Foto:
Dokumentasi Tifa
Freepik.com

DAFTAR ISI

8

**MEMBANGUN
MOMENTUM
PERUBAHAN**

12

**PESAN DEWAN
PENGURUS**

14

**SAMBUTAN
DIREKTUR
EKSEKUTIF**

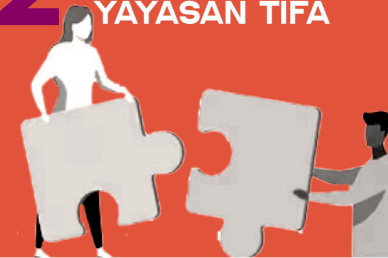


18

**TENTANG
YAYASAN TIFA**

22

**STRUKTUR DAN
KEPEMIMPINAN
YAYASAN TIFA**



24

**PARA
PENABUH TIFA**

30

**STRATEGI
PROGRAM**

32

**BEKERJA
DENGAN ARAHAN
STRATEGIS TIFA**

42

**PROGRAM
HEAL**

52

**PROGRAM
JURNALISME
AMAN**

62

**PROGRAM
DANA BAGI
HASIL SUMBER
DAYA ALAM**

70

**PROGRAM
REVIEW**

80

**KEBIJAKAN
DAN TATA
KELOLA DATA**



88

**STRATEGIC
PARTNERSHIP**

90

**PARA MITRA
LEWAT
DUA SKEMA**

92

**MELUASKAN
JANGKAUAN
DARI
RANAH MAYA**

94

**HARAPAN
UNTUK
TIFA**



#1

TIFA » Tema



MEMBANGUN MOMENTUM PERUBAHAN

SEPERTI pesawat yang hendak terbang, tahun lalu Yayasan Tifa berada dalam tahap *taxiing*—bergerak dengan tenaga sendiri menuju landasan pacu. Belum tancap gas, memang. Tapi telah ada kesiapan untuk membangun momentum.

Pengibaratan yang datang dari Ketua Dewan Pengurus Tifa Endy Bayuni tersebut tampaknya pas untuk menggambarkan apa yang bisa dicapai sejak 2019. Empat tahun lalu itu Tifa harus berpisah jalan dengan Open Society Foundations (OSF), lembaga yang sejak awal menjadi pendukung dan satu-satunya sumber pendanaannya. Meski merupakan keputusan bersama, tidak mudah menghadapi kondisi ini. Konsekuensi yang telah siap untuk dihadapi saat ini adalah Tifa harus bekerja keras, bukan saja untuk bertahan, dengan membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga pendana atau donor alternatif dalam kondisi perhatian banyak lembaga pendana kepada Indonesia mulai berkurang, melainkan juga untuk meredefinisikan diri agar tetap relevan.

Direktur Eksekutif Tifa periode 2019-

2022, Shita Laksmi, menyebut kerja keras itu sebagai “berjibaku”. Dalam deskripsi ringkasnya ini terkandung unsur “tidak ada pilihan lain”; ada pula unsur ketekatan. Melalui kerja keras itu, di samping mencari pengganti OSF, Tifa harus melalui masa transisi yang meliputi upaya reorganisasi internal, reformulasi fungsi yang dijalankannya, dan mengeset ulang strateginya. Tifa sadar harus bertransformasi. Ada beberapa langkah yang diambil. Salah satunya Tifa perlu mengembangkan kompetensi kelembagaan maupun staf individual sebagai bagian dari upaya transisional.

Dalam proses internal, melibatkan pula para staf, Tifa memutuskan menjadi lembaga yang di samping masih menjalankan fungsi sebagai penyalur dana (*grantmaking*), ikut pula terlibat langsung dalam pelaksanaan program (*implementer*). Dengan kedua peran ini, Tifa bisa disebut lembaga hibrida, bisa pula lembaga perantara (*intermediary*). Mau label yang mana pun, yang pasti adalah Tifa telah beralih rupa menjadi Tifa baru.

Melalui proses analisis mendalam yang



cukup panjang, peralihan itu, mau tidak mau, juga mempertimbangkan situasi eksternal berupa menurunnya kualitas demokrasi, menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil, dan represi kebebasan berekspresi. Melalui konsinyering pada 2022, dalam situasi demikian, Tifa memutuskan berfokus pada empat isu besar: perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan minoritas; tata kelola sumber daya alam yang tidak adil dan tidak berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tiga krisis, energi, pangan, serta iklim; akuntabilitas sosial

dalam kelembagaan demokrasi; dan tata kelola data dan teknologi digital.

Empat isu besar tersebut tercakup dalam skema segitiga yang menautkan tema-tema besar yang merupakan fokus perhatian Tifa. Segitiga yang telah digunakan sejak 2021 ini, menurut Oslan Purba, Manajer Pengembangan Program Tifa, juga “menjelaskan relasi di antara ketiganya”.

Ketiga tema yang bisa dipandang sebagai kerangka program itu adalah



1



2



3



1. Kegiatan Pemetaan Potensi SDA.

2. Sosialisasi Perlindungan Sosial.

3. Dialog Kebijakan antara FDI dan Pemda.

hak asasi manusia, tata kelola sumber daya alam, dan tata kelola digital. Mendorong demokrasi dan hak asasi manusia adalah isu yang sudah identik dengan Tifa, sumber daya alam adalah isu yang tak terelakkan mengingat kondisi mutakhir terkait lingkungan hidup serta perubahan iklim, sedangkan tata kelola digital adalah isu yang baru

dikembangkan sebagai fokus kerja Tifa. Meski demikian, akuntabilitas digital ini bukan hanya merupakan respons atas perkembangan pesat transformasi digital di Indonesia, tapi juga sebagai sarana mendorong proses demokratisasi secara digital. Pertimbangan dalam menentukan ketiganya: isu-isu tersebut yang paling relevan, berkelindan dengan kecakapan yang ada pada Tifa, dan terutama bisa jadi pembeda eksistensi Tifa.

Fase transisi kini telah berakhir. Tahun lalu merupakan kali pertama Tifa bisa bekerja sebagai Tifa baru, dengan melaksanakan lima program yang juga baru bersama para mitranya. Implementasi program-program ini dimungkinkan berkat dukungan

lembaga-lembaga pendana yang percaya terhadap visi dan misi Tifa, tentang apa yang diperjuangkannya selama ini dan apa yang bisa dicapai melalui program-programnya. Isu-isu yang menjadi fokus meliputi pemenuhan hak dan kesetaraan bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, disabilitas, dan kelompok minoritas agama dan keyakinan; keamanan bagi jurnalis; partisipasi masyarakat dalam mereviu kegiatan pemerintah; pemanfaatan dana bagi hasil sumber daya alam untuk pemenuhan standar pelayanan minimal; dan advokasi perlindungan data pribadi.

Dengan terlaksananya program-program tersebut, Tifa yakin telah berhasil meletakkan landasan untuk

mengukuhkan diri kembali sebagai organisasi yang punya riwayat serta rekam jejak lebih dari 20 tahun dan kembali mulai mendorong tumbuhnya elemen-elemen perubahan di tingkat masyarakat sipil dan negara. Perubahan-perubahan itu terutama berlangsung dalam kaitannya dengan isu-isu yang menyangkut masyarakat terbuka.

Bisa dikatakan, untuk tahun-tahun mendatang, Tifa telah siap membangun momentumnya, mengakselerasi lajunya untuk terus melanjutkan kemajuan yang telah dicapainya. Bersama dengan itu, melalui independensinya dalam bekerja dan berkolaborasi, Tifa juga tidak akan berhenti menciptakan dampak. ●

Pesan Dewan Pengurus

Endy Bayuni

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa

TAHUN lalu Yayasan Tifa menyelesaikan konsolidasi yang tak terhindarkan karena perubahan internal dan eksternal. Proses menjadi Tifa baru kini telah lengkap. Fondasi sudah kuat. Sekarang tinggal mengembangkannya.

Situasi yang mendorong perubahan tersebut sebenarnya terjadi mulai 2019. Ketika itu Yayasan Tifa resmi lepas dari Open Society Foundations (OSF) melalui kesepakatan bersama. Dengan kesepakatan ini, Tifa tidak lagi punya pendana tunggal. Hal ini menyebabkan Tifa harus beradaptasi. Proses adaptasi yang dilalui itu tidak mudah. Sangat sulit. Sebab perubahannya drastis.

Dalam perubahan itu Tifa memutuskan untuk bertransformasi menjadi lembaga yang bukan hanya berperan sebagai penyalur dana (*grant-making*), melainkan sekaligus menjadi pelaksana (*implementer*) program. Tifa menjadi lembaga



hibrida. Untuk hal ini, secara internal, Tifa perlu merombak diri, secara organisasi dan kapasitas sumber daya manusianya, yang mulanya memang tidak disiapkan bekerja sebagai pelaksana program.

Hal lain yang mendorong transformasi itu adalah tantangan menyangkut keberadaan mitra-mitra kami. Menjaga dan mempertahankan kerja sama yang telah berlangsung lama dengan mereka, ratusan jumlahnya, adalah keniscayaan. Tifa dan para mitranya memiliki kesamaan persepsi mengenai Indonesia yang hendak kami arahkan menjadi lebih menghargai keterbukaan, keberagaman, kesetaraan, dan keadilan. Para mitra itu pun masih punya program untuk tujuan ini. Tapi, pada saat yang sama, kemampuan Tifa untuk menyalurkan dana terbatas.

Kondisi pandemi Covid-19 serta adanya persepsi di kalangan lembaga pendana bahwa Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah (*middle-income country*) menjadi perintang bagi upaya mencari sumber dana baru, pengganti dana OSF. Pandemi membatasi pergerakan dan kegiatan di luar ruang; sedangkan persepsi lembaga pendana menjadikan penyaluran dana ke Indonesia berkurang. Dengan keyakinan bahwa masih banyak program terkait isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, sumber daya alam, dan perlindungan data digital yang perlu dilaksanakan di Indonesia, Tifa bekerja keras.

Perjuangan Tifa untuk meyakinkan lembaga-lembaga pendana tidak sia-sia. Tahun lalu adalah periode ketika Tifa bisa mengatakan bahwa fondasi kami sebagai Tifa baru telah kuat. Kami telah menggandeng beberapa lembaga pendana baru; kami jadi mantap menjadi lembaga hibrida yang lebih independen. Kami yakin bahwa ke depan kami akan terus berkembang: bertambah lembaga pendana, mitra semakin banyak dan beragam, dan rekrutmen staf sesuai kebutuhan.

Sebagai langkah awal dalam peran lembaga hibrida itu, tahun lalu Tifa telah dan sedang menjalankan beberapa program bersama para mitra. Implementasi program-program ini bertumpu pada segitiga program strategis—hak asasi manusia dan demokrasi, tata kelola sumber daya alam, serta tata kelola data digital—yang kami terapkan sejak tahun sebelumnya. Program-program itu meliputi isu-isu pemenuhan hak dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan, keamanan bagi jurnalis, partisipasi masyarakat dalam mereview kegiatan pemerintah, dan pemanfaatan dana bagi hasil sumber daya alam untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.

Bisa dikatakan program-program itu bukan saja mencapai atau menunjukkan hasil yang baik, melainkan juga menegaskan keputusan transformasi Tifa telah berjalan dengan semestinya. Berbagai pelajaran yang didapat sangat berguna dalam menguatkan Tifa baru—menyangkut kapasitas keorganisasian sekaligus stafnya—untuk melangkah ke tahun-tahun selanjutnya. ●

Sambutan Direktur Eksekutif

Shita Laksmi

Direktur Eksekutif Yayasan Tifa
Periode November 2019–
Desember 2022



TAHUN 2022 adalah tahun menyambut Tifa yang baru. Tifa memulai 2022 dengan beragam program baru yang memperkuat portofolio di tiga bidang utama Tifa bekerja, yaitu Hak Asasi Manusia, Manajemen Sumber Daya Alam, dan Tata Kelola Digital. Secara internal, 2022 adalah penanda bahwa fondasi untuk transformasi sudah diletakkan untuk kemudian diperkuat di tahun berikutnya agar bisa terus berlanjut.

Kalau 2021 adalah tahun perubahan, maka 2022 adalah tahun memulai Tifa yang baru, yang prosesnya sudah dimulai sejak akhir 2019. Setelah selama 19 tahun lebih Tifa berperan sebagai lembaga yang memberi dana hibah (*grant making institution*), pada 2022, Tifa makin mantap dengan identitas baru.

Tifa yang baru adalah Tifa yang

menjalani peran sebagai *intermediary organization* atau organisasi perantara, yang tugasnya adalah menyalurkan dana kepada organisasi masyarakat sipil dan, kedua, Tifa juga melakukan implementasi program secara independen berdasarkan visi, misi, dan nilai Yayasan Tifa.

Perjalanan 3 tahun adalah perjalanan yang penuh tantangan karena Tifa harus secara sistematis mengubah proses dan cara kerja, termasuk di dalamnya cara berpikir dan “otot” Tifa. Secara perlahan tetapi pasti, dibantu pendanaan yang makin beragam serta mitra kerja, Tifa mulai membangun portofolio sebagai Tifa yang baru.

Pada 2022, Tifa makin mantap menjadikan pendekatan segitiga program—fokus program strategis

kami—sebagai pedoman untuk bekerja. Segitiga itu menautkan isu-isu hak asasi manusia, sumber daya alam, dan tata kelola digital. Pada awalnya konsep segitiga program itu masih abstrak dan belum terlihat bagaimana bisa diimplementasikan, tetapi seiring dengan portofolio yang bertambah dan tim Tifa yang makin kuat serta terampil, Tifa makin jelas menjalankannya.

Tahun 2022, Tifa kehadiran banyak anggota tim baru—sebagai konsekuensi dari pilihan kerja Tifa. Tifa juga melakukan reorganisasi sesuai dengan kebutuhan Tifa yang berubah, termasuk menjalani portofolio Tifa yang baru.

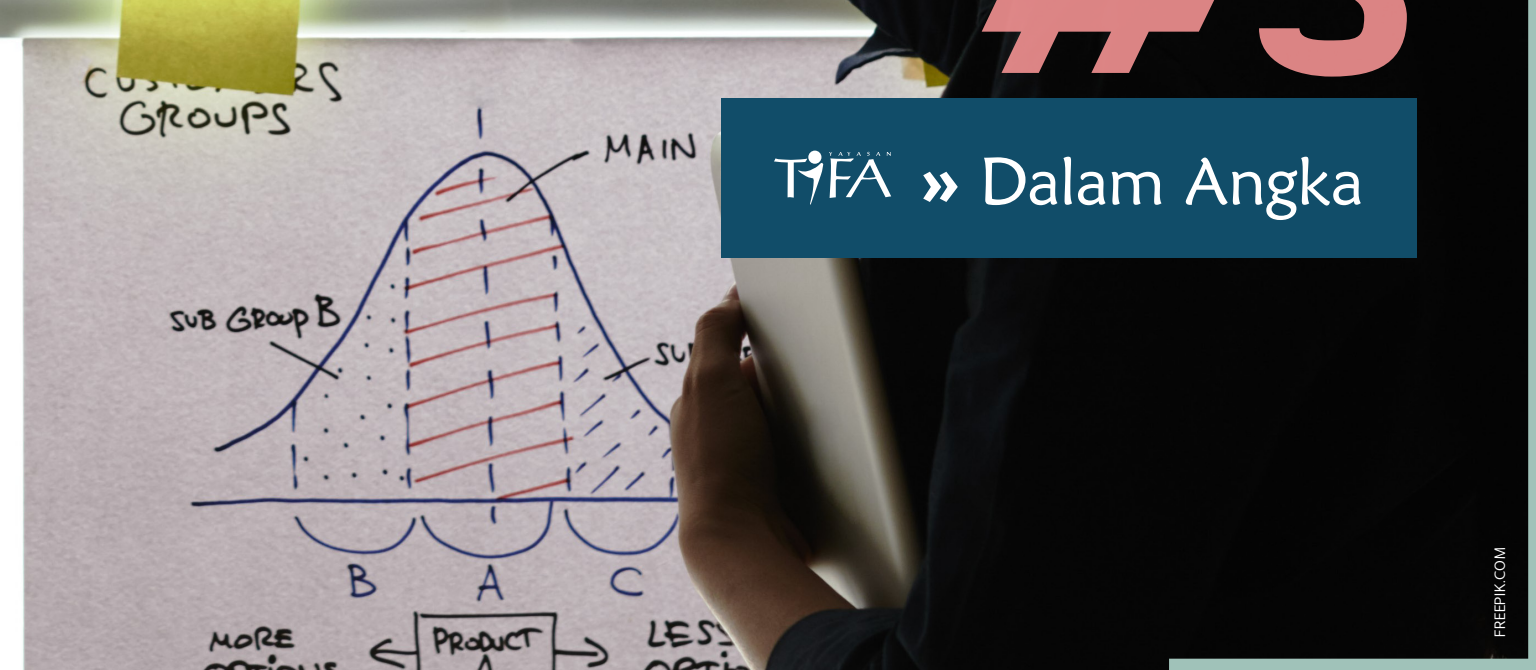
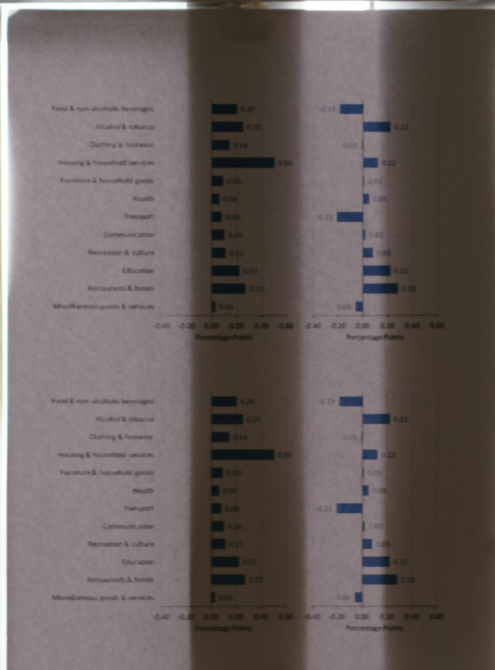
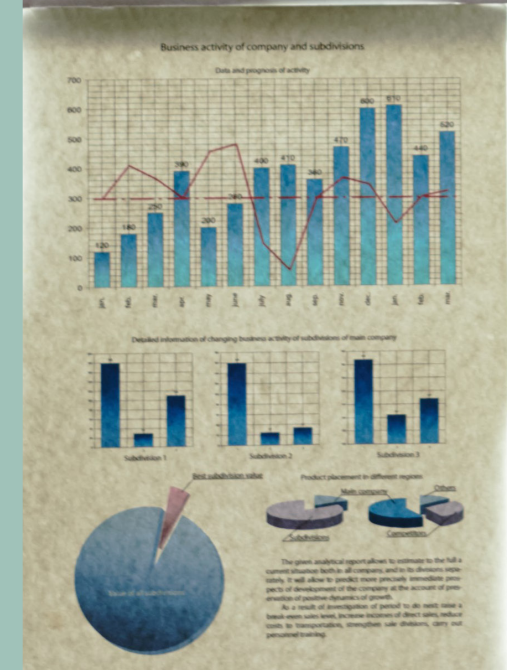
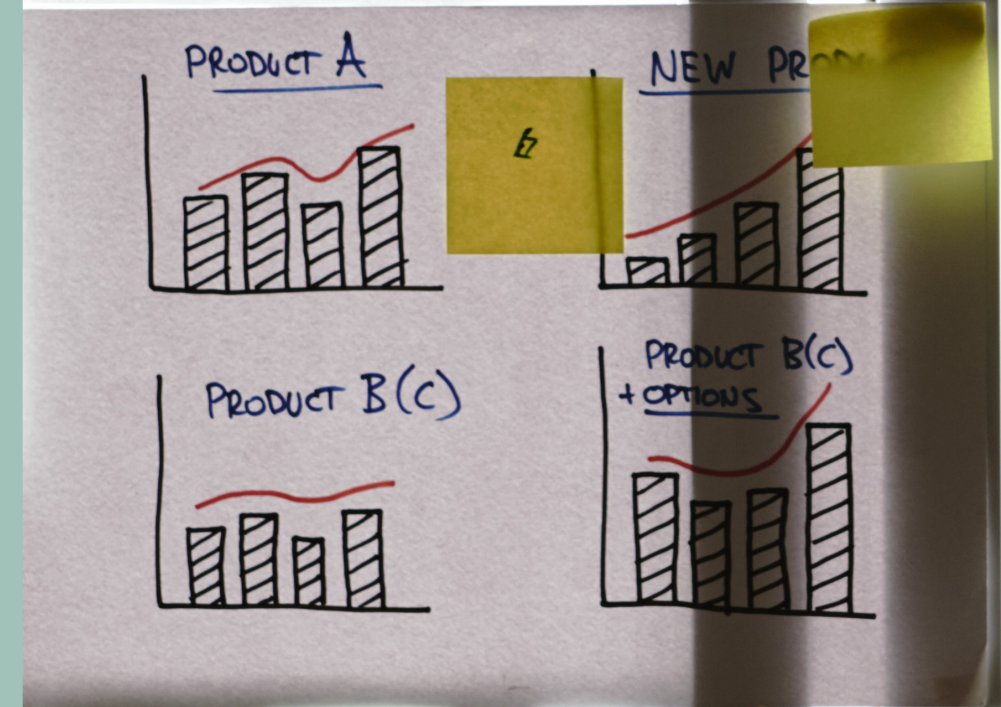
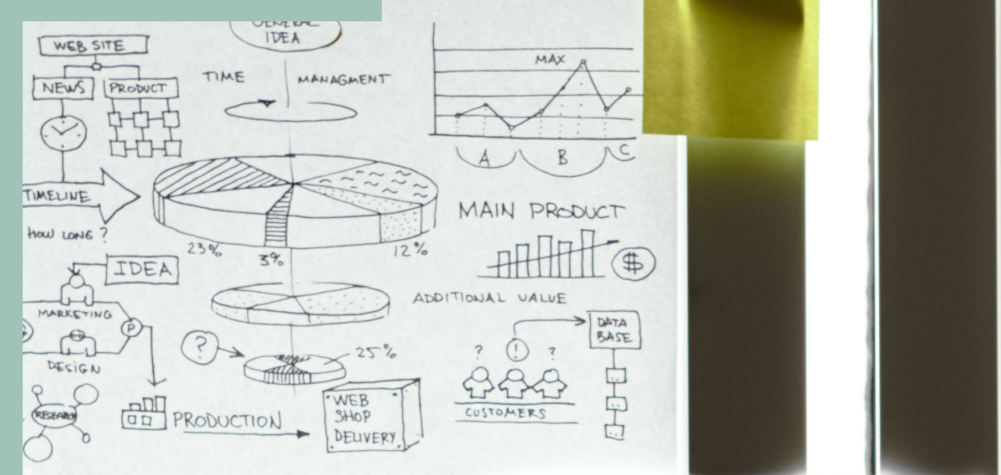
Sebagian tahun 2022 dijalani dengan pandemi tetapi dengan semakin longgarnya pandemi di pertengahan 2022, Tifa tetap bisa mengerjakan program-program baru Tifa tersebut tanpa hambatan yang berarti.

Selama periode itu, melalui beragam program yang kami kerjakan bersama para mitra dan dukungan serta kepercayaan lembaga pendana, kami

bisa langsung menguji keyakinan bahwa Tifa baru memang bisa memberi dan memperoleh nilai tambah sebagai organisasi perantara. Di samping itu, dalam kaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, Tifa dapat memerankan peran sebagai *hub*, inisiator diskusi multi-kepentingan, juga memberikan program pengembangan kapasitas.

Tifa juga secara konsisten menanggapi isu krusial yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, ekosistem data digital terutama data pribadi, penguatan demokrasi, keadilan transisional, pengelolaan sumber daya alam serta pemenuhan hak asasi manusia terutama untuk kelompok rentan.

Dengan berlalunya 2022, bisa dikatakan segala jatuh bangun dalam proses adaptasi sepanjang dua tahun sebelumnya bukanlah kesia-siaan. Secara bersama-sama, kami mampu memetakan arah perjalanannya sebagai lembaga yang lebih independen untuk tahun-tahun selanjutnya. ●



STRATEGI PROGRAM

YAYASAN Tifa telah merancang kerangka programnya untuk periode 2020-2024. Tapi, pada Juni 2021, Tifa memutuskan menajamkan area kerjanya, memperbarui arah strategis (*strategic direction*) yang hendak dituju dan dampak (*outcome*) yang mau diwujudkan. Hasilnya adalah sebagai berikut.

Mensinergikan upaya masyarakat sipil untuk mendorong kebijakan-kebijakan inklusif yang sesuai dengan nilai hak asasi manusia (HAM) dan memenuhi akses terhadap keadilan bagi semua warga.

Outcome:

- » Penguatan dan konsolidasi kelompok masyarakat sipil yang mampu mempromosikan dan mengadvokasi tuntutan kebebasan berpikir dan berekspresi.
- » Pemerintah dan masyarakat yang pluralis dan toleran yang memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak kelompok minoritas yang rentan (kelompok minoritas agama dan keyakinan, masyarakat adat, minoritas gender dan seksualitas) serta korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Memperkuat upaya-upaya pencapaian keadilan sumber daya alam dan lingkungan bagi komunitas terpinggirkan/marginal.

Outcome:

- » Masyarakat marginal mampu berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- » Meningkatnya resiliensi dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim, khususnya mereka yang bergantung pada sumber daya alam secara langsung.

Inovasi gerakan sosial dan pendalaman demokrasi.

Outcome:

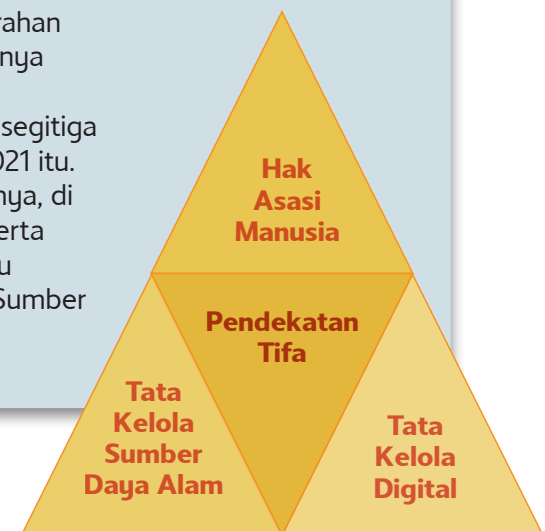
- » Pendalaman demokrasi dan menguatnya inovasi gerakan sosial.
- » Meningkatnya partisipasi publik dan inovasi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan proses pembangunan yang inklusif.

Mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam ekosistem data digital.

Outcome:

- » Membaiknya implementasi terkait privasi dan perlindungan data pribadi di area kerja Yayasan Tifa (misalnya pelayanan publik untuk kelompok marginal).
- » Kelompok masyarakat sipil bisa terlibat secara aktif dalam pengembangan peraturan terkait data digital.

Untuk mengimplementasikan arahan-arahan tersebut, Tifa memanfaatkan pedomannya berupa segitiga tema-tema besar yang menjadi fokus Tifa. Gagasan mengenai segitiga ini disepakati dalam forum pada Juni 2021 itu. Belakangan Tifa mempertajam konsepnya, di antaranya dengan memperjelas relasi serta pertalian antartema. Tiga tema besar itu adalah Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Sumber Daya Alam, dan Tata Kelola Digital.

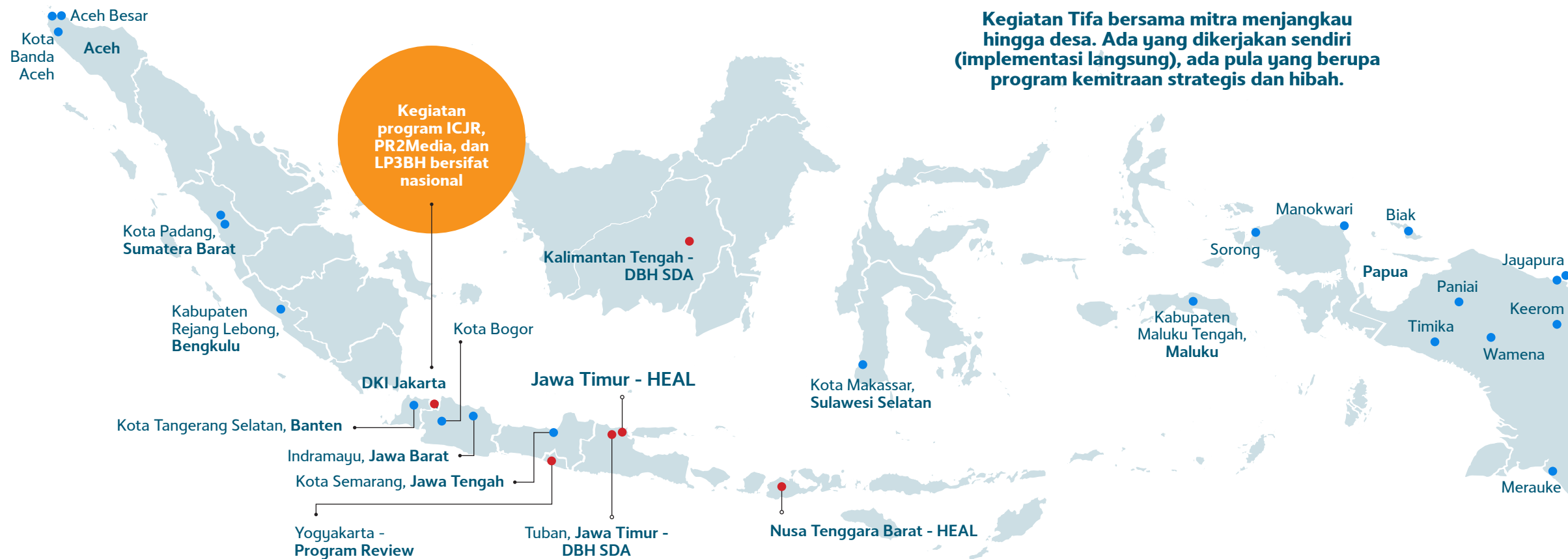


BEKERJA DENGAN ARAHAN STRATEGIS TIFA

SEPANJANG 2022, Yayasan Tifa menggelar program di sejumlah wilayah di Indonesia. Ada di Aceh, ada pula di Tanah Papua. Menggunakan panduan empat arah strategis Tifa, buhul seluruh program adalah Segitiga Hak Asasi Manusia, Sumber Daya Alam, dan Tata Kelola Digital, sebuah model pendekatan program hasil re-strategi Yayasan Tifa pada Juni, setahun sebelumnya.

- Implementasi Langsung
- Program Hibah & Kemitraan Strategis

Kegiatan Tifa bersama mitra menjangkau hingga desa. Ada yang dikerjakan sendiri (implementasi langsung), ada pula yang berupa program kemitraan strategis dan hibah.



Mitra: Save The Children, YLBHI, PPMN, HRWG, FITRA-Jatim, Yayasan Tambuhak Sinta, Japan Initiative, The David Lucile & Packard Foundation, Alterasi Indonesia, LBH Pers, Universitas Atma Jaya, Kementerian Luar Negeri Pemerintah Jepang

YANG DIPAHATKAN SEPANJANG 2022

7 Januari

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi (PDP) di mana Yayasan Tifa bergabung mendesak pemerintah mengoptimalkan PP 71/2019 dan Permenkominfo 20/2016 karena dugaan kebocoran data 6 juta pasien Covid-19.

25 Januari

Konsorsium Jurnalisme Aman (Yayasan Tifa, HRWG, PPMN) meminta pemerintah mengusut tuntas intimidasi kepada jurnalis Papua, Victor Mambor.



11 April

Peluncuran Program Jurnalisme Aman dalam webinar bertopik “Kebebasan Berekspresi, Perlindungan, dan Keamanan Jurnalis di Indonesia”.

16 Maret

- » Program Tata Kelola Data Yayasan Tifa meluncurkan laporan riset hasil kerja sama dengan CIPG dan pendanaan dari Luminare dalam webinar bertajuk “Pandemi, Data, dan Pelayanan Publik: Refleksi Dua Tahun Covid-19 di Indonesia”.
- » Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi meminta RUU PDP segera disahkan menjadi undang-undang.

17-18 Maret

Kickoff Meeting Program Jurnalisme Aman Yayasan Tifa bersama PPMN dan HRWG atas dukungan Kedutaan Belanda.

18 Maret

Save the Children, Tifa, dan YLBHI melaksanakan proyek HEAL dengan pendanaan dari Uni Eropa.

30 Maret

Tifa menyatakan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi harus selaras dengan standar internasional serta kebutuhan lokal.



20-21 Mei

Uji Coba Program Review di Kelurahan Sriharjo dan Guwosari, Tuban.

28 Mei

Tifa mendukung kegiatan Webinar Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan akademisi dan praktisi dari UI, Binus, dan Go To bertema “Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi Secara Kolaboratif”.

31 Mei

Peluncuran kertas kebijakan “Tantangan Mewujudkan Pelindungan Data Pribadi dalam Tata Kelola Data di Sektor Kesehatan dan Pendidikan”.

Akses dokumen dengan memindai qrcode ini:



atau melalui link:
<https://www.tifafoundation.id/buku/policy-paper/tantangan-mewujudkan-perlindungan-data-pribadi-dalam-tata-kelola-di-sektor-kesehatan-dan-pendidikan/>

16 Juni-15 Juli

Yayasan Tifa membuka pendaftaran Call for Proposal 2022 untuk implementasi 2023.

17 Juni

Diseminasi Riset “Menata Kelola Data Demi Pelayanan Publik: Laporan Studi Kasus Tata Kelola Data Sektor Kesehatan dan Pendidikan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19”.

Akses dokumen dengan memindai qrcode ini:



atau melalui link:
<https://www.tifafoundation.id/buku/laporan-studi-kasus/menata-tata-kelola-data-demi-pelayanan-publik/>



26-29 Juli
Penguohan Forum Desa Inklusif dalam program HEAL di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

12 September
Debora Irene menjadi pembicara dan Shita Laksmi sebagai pemandu diskusi dalam Panel Discussion the 2022 Asia-Pacific regional Internet Governance Forum (APrIGF) di Singapura bertajuk “Advancing Data Justice in (Post-) Pandemic Data Governance: Perspectives from Southeast Asia”.



19-25 Oktober
Kunjungan belajar Program Review ke Jepang.

16 Desember
Yayasan Tifa merayakan ulang tahun ke-22. Dalam acara bertema “Merawat Keberagaman, Menyambut Pemilu yang Bermakna” itu, Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Shita Laksmi menyatakan pemilihan umum 2024 berpotensi diisi berbagai praktik buruk politik yang dapat memperkuat polarisasi.

1 Agustus
Penguohan Forum Desa Inklusif dalam program HEAL di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

9 Agustus
Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Shita Laksmi menjadi pembicara dalam Panel Discussion Side Event of G20 “Mainstreaming Open Government Values in Governance and Sustainable Development” di Bali.

September
Peluncuran Kertas Kebijakan “Optimalisasi Dana Transfer ke Desa untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Melalui Reformasi ADD di Kabupaten Tuban”.

Akses dokumen dengan memindai qrcode ini:



atau melalui link:
<https://www.tifafoundation.id/buku/optimalisasi-dana-transfer-ke-desa-untuk-pemenuhan-standar-pelayanan-minimal-spm-melalui-reformasi-add-di-kabupaten-tuban/>

2 November
Talk Show di TVRI dengan topik “Peran Perempuan Dalam Transformasi Digital di Indonesia”. Shita Laksmi menjadi salah satu narasumber.



Akses dokumen dengan memindai qrcode ini:



atau melalui link:
<https://www.tifafoundation.id/buku/aktivisme-digital-di-indonesia/>

ANGGARAN PROGRAM

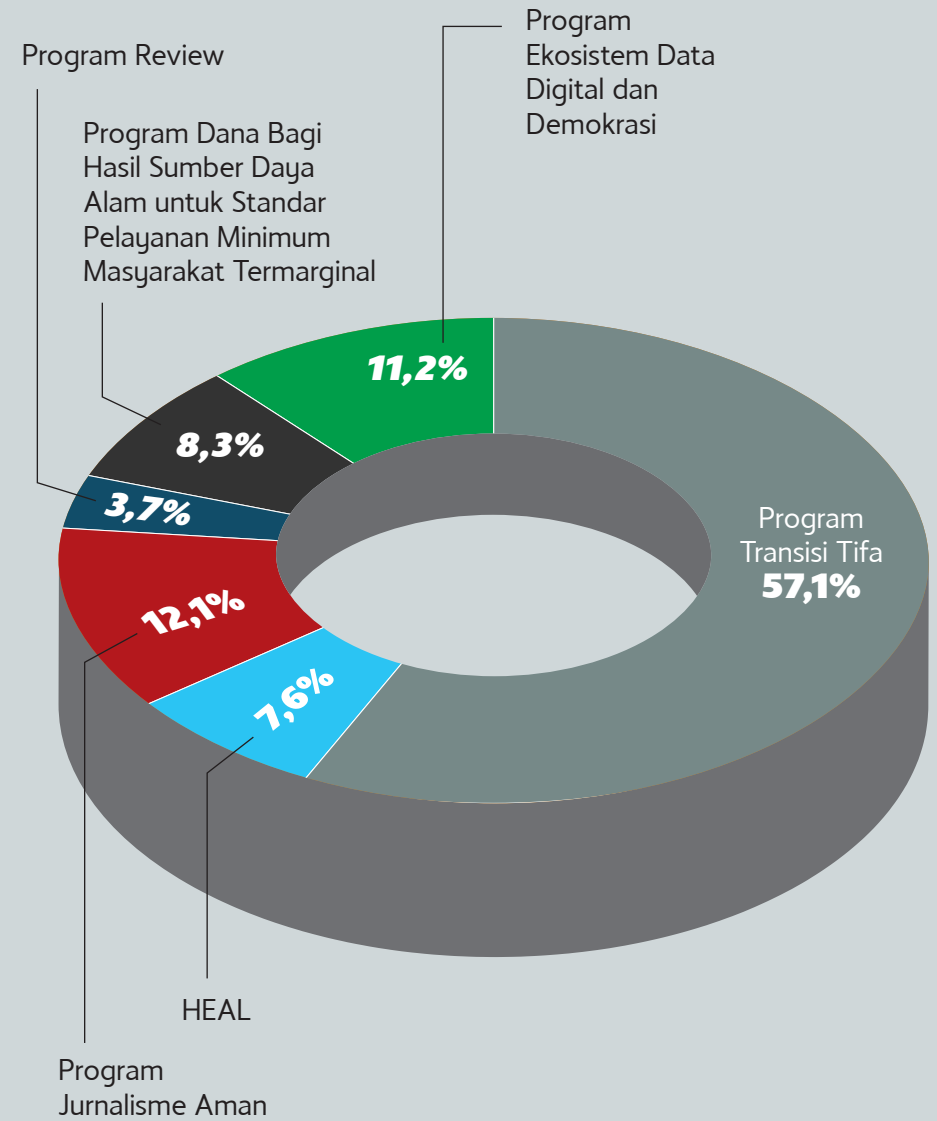
PADA 2022, Yayasan Tifa mendapat 4 mitra donor baru. Keempat donor tersebut adalah Kedutaan Belanda untuk Program Jurnalisme Aman, Ford Foundation untuk Program Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk Standar Pelayanan Minimum Masyarakat Termarginal, Packard Foundation untuk Program Ekosistem Data Digital dan Demokrasi, serta Open Society Foundations untuk Program Hibah & Kemitraan Strategis, yang juga merupakan program Transisi Tifa.



TOTAL ANGGARAN:
Rp 38 Miliar

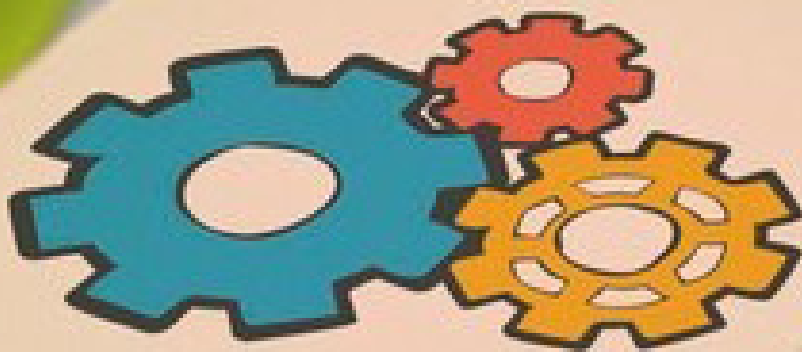
*)Termasuk anggaran program 2021 yang masih berjalan pada 2022

PROGRAM



#4

TIFA » Program



Coptic
Painting
@ 1 PM

NEW
Concept!

PASSION
NEW



1

“Sesudah Tifa masuk ada perbaikan dan pemutakhiran data, menjadi lebih valid dan penerima program lebih tepat sasaran. Kalau ada penerima bantuan langsung tunai yang sudah meninggal, kami segera ganti dan update.”

Nita Komari, fasilitator desa, Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik



PROGRAM
HEAL



2



4



3



- ● ●
- 1. Dialog Kebijakan antara FDI dan Pemda.
- 2. Kegiatan FDI Pembagian Kartu Tanda Pengenal Anak.
- 3. Sosialisasi Perlindungan Sosial.
- 4. Kegiatan FDI Kelas Pengolahan Pangan Lokal.

AKSI DEMI HAK KELOMPOK RENTAN

PROGRAM ini bermula dari kesepakatan membentuk konsorsium setelah ada serangkaian pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa. Tiga lembaga, Yayasan Tifa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Yayasan Save the Children Indonesia, setuju berkolaborasi melaksanakan program atau aksi yang berfokus pada pemenuhan hak-hak kelompok rentan dalam konteks pandemi.

Kesamaan pikiran ketiga organisasi masyarakat sipil itu didukung riset yang memotret kondisi pada masa pandemi, kelompok rentan semakin rentan. Riset Tifa pada 2021 menemukan, di antaranya, kelompok rentan di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus membiayai pengobatan anak di fasilitas kesehatan dalam kondisi krisis ekonomi keluarga (68 persen); anak berkebutuhan khusus tidak dapat berpartisipasi di sekolah (15 persen); dan responden menghadapi kendala pembelajaran daring karena rendahnya literasi digital dan minimnya prasarana informasi dan teknologi (79 persen).

Kondisi itu membenarkan dugaan bahwa kalau pada masa normal saja rentan, apalagi pada masa pandemi.



Proyek Tifa ini, menurut Zico Mulia, Program Officer for Human Rights-nya, “berupaya mendorong agar mereka (kelompok rentan) mendapatkan perlindungan sosial”. Kelompok rentan ini meliputi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok minoritas agama/keyakinan yang hidup dalam kemiskinan.

Kesepakatan menjelang akhir 2020 tersebut direalisasikan mulai Februari 2021. Ada 10 desa di NTB dan Jawa Timur yang jadi sasaran intervensi. Programnya dinamai HEAL atau Human Rights and Equality to Achieve Sustainability. Tifa, YLBHI, dan Save the Children Indonesia berfokus pada kegiatan-kegiatan spesifik masing-masing, dengan keluaran yang berbeda dan saling melengkapi, tapi dalam kerangka serta sasaran akhir yang sama. Koordinasi tetap tak terhindarkan, tentu saja.

Berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan sosial, Tifa menjalankan serangkaian kegiatan sejak dari hal mendasar untuk menyiapkan siapa saja yang akan

terlibat dalam implementasi program hingga pelaksanaannya. Penyiapan ini meliputi riset, diseminasi hasil riset, pembagian pengetahuan, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, dialog kebijakan dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pada periode 2022, Tifa melanjutkan upaya yang telah dimulai pada tahun sebelumnya dengan rekrutmen penggerak masyarakat di desa, pelatihan untuk penggerak masyarakat, sosialisasi tentang program perlindungan sosial, dan rembukan tentang Forum Desa Inklusif (FDI). Gagasan tentang forum ini timbul manakala dalam sosialisasi program perlindungan sosial diketahui betapa dalam praktik masih terjadi pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Informasi tentang program perlindungan sosial dari pemerintah lokal belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan. Tifa mendapatkan dukungan pemerintah desa/kelurahan untuk pembentukannya.

FDI dirancang sebagai wadah di tingkat desa untuk melibatkan

masyarakat, termasuk kelompok rentan dan miskin dalam mengakses program perlindungan sosial. Salah satu wujud dari pelibatan itu adalah susunan keanggotaannya. Bukan saja menempatkan unsur pemerintah desa/kelurahan dan yang lain, di dalamnya juga terdapat posisi untuk wakil perempuan, wakil penyandang disabilitas, dan wakil lansia.

Setelah persiapan-persiapan, kemudian pengukuhan, yang disusul rapat perencanaan kegiatan selama setahun, FDI pun bekerja. “Mereka adalah forum yang legal lewat surat keputusan kepala desa,” kata Lorensia Brahma, Project Officer untuk HEAL. Berbekal kecakapan melakukan audit sosial, yang didapat dari Tifa, FDI menjalankan fungsinya dalam aspek-aspek advokasi, penanganan pengaduan, maupun administratif terkait pelaksanaan program.

Berdasarkan pemantauan dan studi yang dilakukan Tifa, FDI terbukti dapat mendorong perubahan kondisi, membukakan akses dan peluang berpartisipasi bagi kelompok rentan. Berkat keberadaan FDI, kelompok itu jadi tahu perihal bantuan sosial, lalu aktif bertanya atau melapor jika ada masalah, dan akhirnya bisa mendapatkan haknya. Para perempuan yang mulanya tak dilibatkan dalam berbagai forum desa pun akhirnya mendapat tempat untuk berpartisipasi. ●



Perempuan di Orobulu pun Jadi Aktif

DESA Orobulu di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, termasuk desa yang peran prianya masih sangat dominan dalam masyarakat. Perempuan sangat jarang berperan di ranah publik, misalnya dalam forum-forum musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa.

“Anggapan yang berlaku adalah tempat mereka, ya, di rumah,” kata Lorensia Brahma, Project Officer for HEAL, Yayasan Tifa. “Padahal, dalam kenyataannya, banyak perempuan yang miskin.”

Ketika Yayasan Tifa masuk untuk menjalankan program Human Rights and Equality to Achieve Sustainability (HEAL) mulanya ada kesulitan menjalin komunikasi dengan pemerintah desa. Mereka menutup diri. Padahal agar kegiatan dalam program berjalan sesuai rancangan, juga untuk mencapai tujuan, perlu mengupayakan keterlibatan atau partisipasi aktif perempuan.

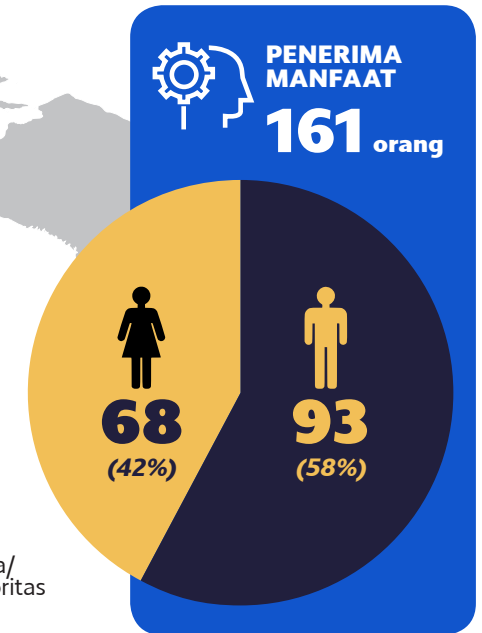
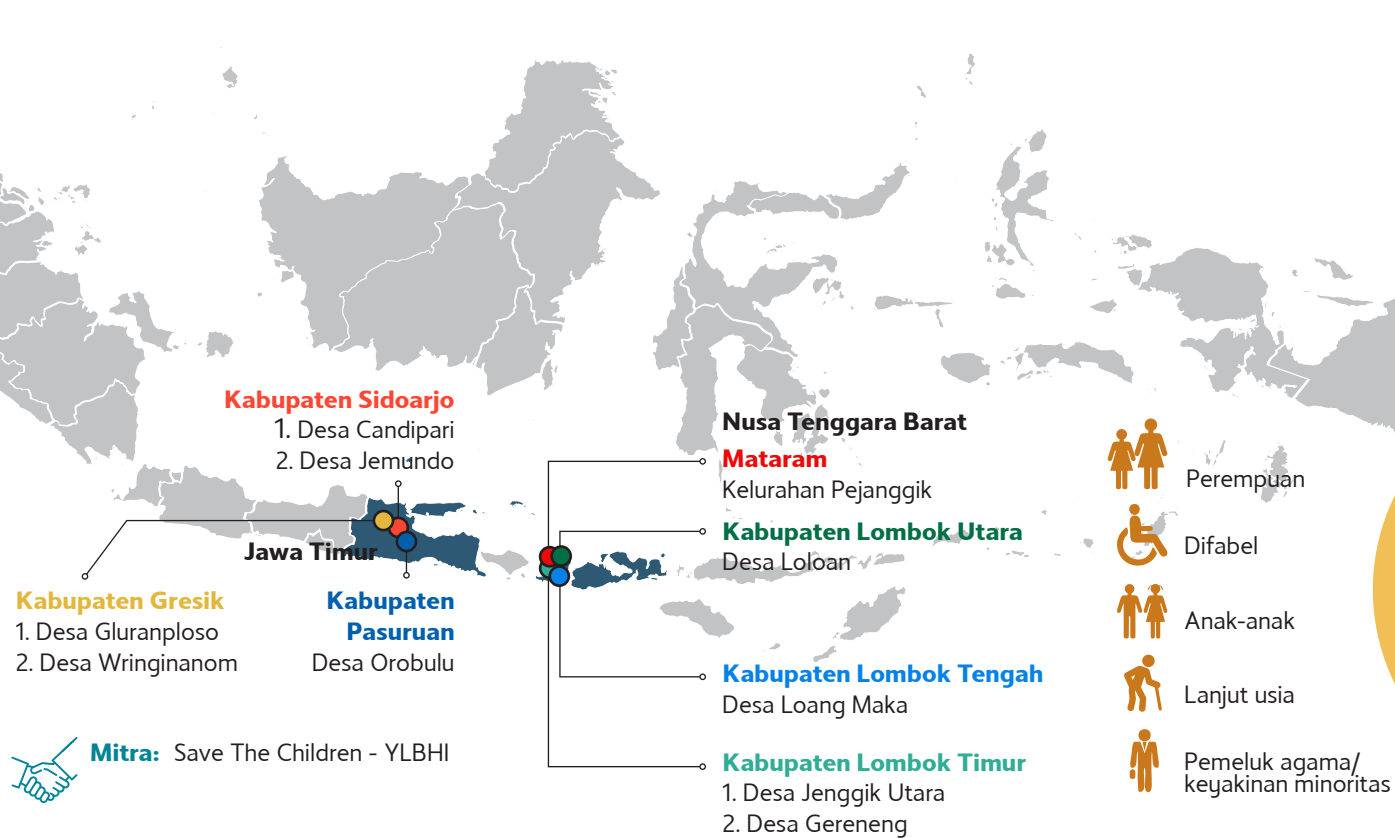
Sejauh yang kemudian Tifa ketahui, ketertutupan itu didasari pandangan negatif terhadap lembaga swadaya masyarakat, berdasarkan pengalaman sebelumnya.

Melalui penggerak masyarakat yang direkrut, Tifa melakukan pendekatan secara intensif. Penggerak masyarakat yang dipercaya untuk itu, seorang perempuan, tak jarang harus menjadi partisipan dalam forum atau kegiatan desa. Sering dia jadi satu-satunya perempuan di antara para lelaki warga desa. Pendeknya, dia gigih membangun komunikasi. Kadang-kadang dia membawakan oleh-oleh sebagai pintu masuk sesuai “kebiasaan” masyarakat lokal.

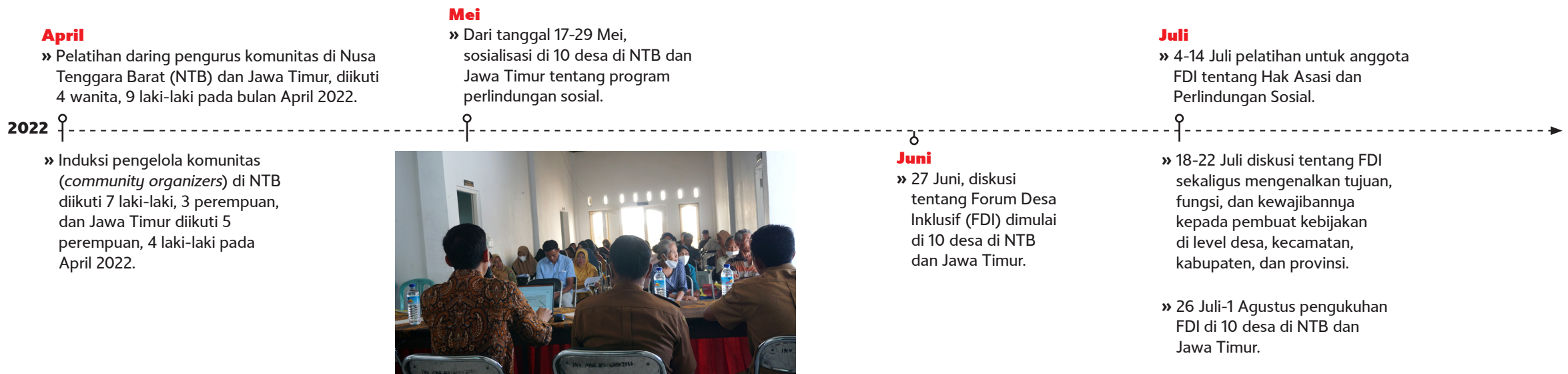
Upaya itu tidak percuma. Setelah setahun lewat Tifa menjalankan kegiatan di Orobulu akhirnya pemerintah desa terbuka dan memberi lampu hijau bagi keterlibatan perempuan. Berkat hal itu, banyak perempuan yang lalu berpartisipasi dalam forum-forum desa, termasuk Forum Desa Inklusif. ●

DESA UNTUK SEMUA

DIMULAI Februari 2021, Program Human Rights and Equality to Achieve Sustainability (HEAL) pada 2022 diisi dengan pelatihan dan rekrutmen penggerak masyarakat, sosialisasi program perlindungan sosial, dan Forum Desa/Kelurahan Inklusif (FDI/FKI) di 10 desa di 7 kabupaten di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.



JEJAK PROGRAM



Agustus

» 12-23 Agustus rapat rencana kerja FDI selama setahun sambil memastikan keberlanjutan FDI setelah proyek HEAL rampung.



September

» 29 Agustus–7 September 2022 pelatihan audit sosial, kegiatan pasca-pelantikan FDI untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan audit sosial dan memantau kelompok rentan.



Oktober–Desember

» Pemantauan desa dilakukan mulai 19 September hingga 5 Desember 2022 diawali dengan perekrutan konsultan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).





PROGRAM

JURNALISME AMAN

“Pengetahuan lewat Jurnalisme Aman dapat mengurangi potensi ancaman saat liputan. Ada materi *digital security* dan keamanan diri yang menurut saya menjadi ilmu penting.”

Yolanda Agne, Pemred Majalah LINTAS IAIN Ambon, mahasiswa Jurusan Journalistik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon

AGAR JURNALIS BISA AMAN BEKERJA



SALAH satu indikator hak asasi manusia dan demokrasi bisa dijamin kelangsungannya adalah kalau jurnalis dapat bekerja dengan bebas dan tanpa rasa takut. Di Indonesia, dalam praktiknya, kebebasan yang ada tak henti-hentinya dicemari fakta ini: bahwa jurnalis kian terpapar pada persekusi politik, kekerasan bahkan di dunia maya, intimidasi, dan surveilans.

Kasus demi kasus kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi. Peluang untuk menjalankan intervensi melalui sebuah program terbuka pada 2021. Ketika itu Pemerintah Kerajaan Belanda lewat Kedutaan di Indonesia memberi kesempatan bagi permohonan pendanaan (call for proposal) untuk menjalankan proyek menyangkut ruang sipil dan demokrasi (civic space and democracy). Bersama Human Rights Working Group (HRWG) dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPNM), Yayasan Tifa bersepakat turut mengirimkan proposal.

Proposal yang mereka ajukan sebagai konsorsium, “Masuk seleksi, (dan) akhirnya lolos,” kata Zico Mulia, Program Officer for Human Rights, Yayasan Tifa.

Proposal ini berisi rancangan program yang bertujuan “menciptakan ekosistem yang aman bagi jurnalis Indonesia untuk bebas menjalankan pekerjaan jurnalistik mereka dan bebas dari risiko kekerasan serta perundungan fisik atau nonfisik atau secara digital”.

Program yang mereka jalankan bersama, dengan Tifa sebagai leader, dinamai Jurnalisme Aman. Implementasinya dimulai pada Januari 2022, setelah sebelumnya HRWG dan PPNM menyiapkan pengorganisasiannya dulu. Menurut rencana, program ini akan berjalan sampai 2025.

Pada 2022, program diawali dengan tahap persiapan, berlangsung sampai Juni. Ini meliputi roadshow dan pertemuan-pertemuan dengan pemangku kepentingan. Masuk dalam tahap ini adalah peluncuran resmi program lewat webinar tentang kebebasan berekspresi dan keselamatan jurnalis di Indonesia.

Serangkaian kegiatan lalu menyusul, dengan audiens sasarannya adalah jurnalis, jurnalis warga, pers mahasiswa, kepolisian, Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Dewan Pers. Kegiatan-kegiatan ini meliputi asesmen dan monitoring atas mekanisme pengaduan; diseminasi Standar Norma dan Pengaturan No. 5 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi dalam Kebebasan Pers dari Komnas HAM; dan pelatihan keamanan digital untuk calon pelatih bagi jurnalis warga, blogger, pers mahasiswa; pelatihan keamanan holistik untuk jurnalis, serta membangun kerja sama dengan perusahaan informasi dan komunikasi untuk keamanan jurnalis. Semua yang dilakukan Tifa, kata Arie Mega, Project Officer Tifa untuk Jurnalisme Aman, berfokus pada “pembangunan kapasitas”.

Dalam implementasi antara Juli-Desember 2022 konsorsium Tifa dan dua mitranya menghadapi tantangan-tantangan, terutama yang sifatnya eksternal. Beberapa kegiatan bahkan sempat tertunda atau dimodifikasi.

Salah satu tantangan terbesar bagi konsorsium Jurnalis Aman adalah membangun kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, hanya hambatan kecil seperti butuhnya

proses dalam membangun kerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). Kedua pemangku kepentingan ini belum sepenuhnya bisa melibatkan diri meski telah diupayakan. Tifa berencana, pada periode berikutnya, untuk mengundang berdiskusi Ketua AJI dan Ketua KKJ demi membangun relasi yang lebih erat.

Hambatan eksternal terbesar menyangkut kegiatan yang melibatkan kepolisian, misalnya pelatihan tentang kebebasan pers dan berpendapat, serta perlindungan jurnalis. Sebagai langkah mitigasi, konsorsium mengalihkan kegiatan ke tahun 2023 dengan metode alternatif yang bisa melibatkan narasumber dari kepolisian.

Sejauh ini program Jurnalisme Aman bisa menguatkan mekanisme advokasi dan koordinasi yang ada untuk kebebasan berekspresi dan keselamatan jurnalis. Dua lembaga ikut berperan di sini, yakni Komnas HAM dan Dewan Pers. Selain itu, konsorsium telah membangun peluang berkolaborasi dengan institusi penting seperti Komnas HAM dan kepolisian.

Tak kalah pentingnya: membangun jejaring yang lebih banyak, termasuk dalam hal advokasi global, sangat mungkin membawa kegunaan yang lebih besar bagi Jurnalisme Aman. Misalnya menautkan pembelajaran darinya dengan inisiatif lain di kawasan, seperti di Filipina. ●

AMAN DI DUNIA NYATA, AMAN DI DUNIA MAYA

KEKERASAN terhadap jurnalis terus terjadi. Untuk mengatasinya, bersama Human Rights Working Group (HRWG) dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPNM), Yayasan Tifa menggelar program Jurnalisme Aman, dengan pembiayaan dari Kerajaan Belanda.



CAPAIAN

140
Jurnalis dalam keamanan fisik maupun digital

Forum multi-stakeholder nasional untuk pembentukan mekanisme

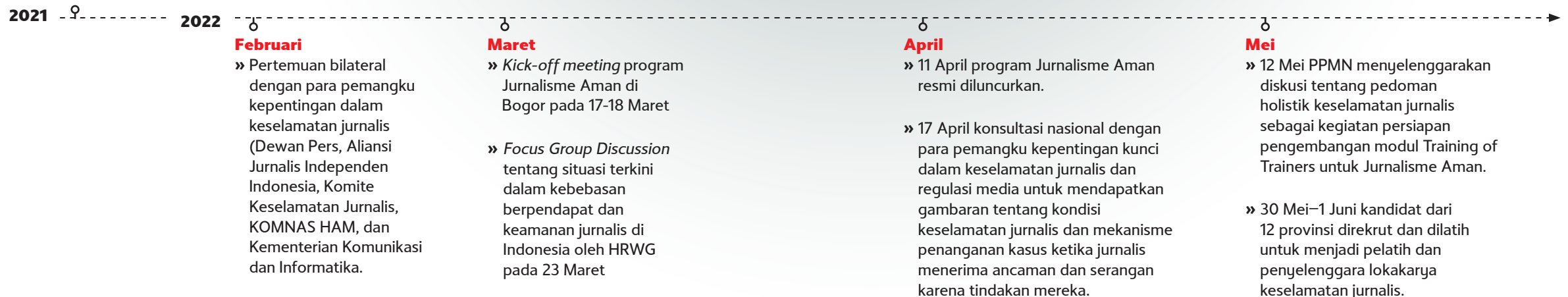
75
Jurnalis tentang pengamanan dan perlindungan yang lebih baik

Mekanisme penanganan kekerasan terhadap jurnalis

JEJAK PROGRAM

Oktober

» Hingga Januari 2022, konsorsium melakukan persiapan program, termasuk diskusi dengan EKN untuk menyempurnakan kerangka kerja Monitoring dan Evaluasi dan proses rekrutmen untuk Project Officer.





Juli

» Pada 14 Juli Yayasan Tifa menggelar pertemuan konsultasi regional pertama di wilayah Indonesia Tengah, dihadiri pemangku kepentingan dari 6 provinsi.

Agustus

» 9 Agustus dilakukan Sosialisasi dan Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) No. 5 Tahun 2021 di Makassar, diikuti 49 orang.

2022

Juni

» Pertemuan konsultasi regional pertama tentang mekanisme penanganan pengaduan yang efektif untuk wilayah barat di Jakarta, pada 17 Juni, dihadiri pemangku kepentingan dari 8 provinsi Wilayah Barat Indonesia paling berisiko bagi jurnalis.

» Pertemuan HRWG dengan AJI Medan untuk mengkaji tantangan pelaporan kasus dan kondisi kebebasan pers di Medan pada 20-22 Juni 2022.

» HRWG dan Komnas HAM menggelar sosialisasi Standards Norms dan Procedures (SNP) tentang Kebebasan Berekspre di Medan, pada 21 Juni.

» 24 Juni, di Jakarta, HRWG mengadakan FGD tentang efektivitas mekanisme penanganan dan pemantauan kasus jurnalis dan kebebasan pers, melibatkan Komnas HAM, Kemkominfo, Dewan Pers, LBH Pers, KKJ, AMSI, LBH Jakarta, FSMPI, SINDIKASI, ELSAM, dan SAFEnet Indonesia.



» PPMN menggelar pelatihan dasar Jurnalis Aman di Bogor pada 11-13 Agustus diikuti 14 jurnalis dan 1 aktivis NGO.

» 20-21 Agustus 2022, koordinasi perwakilan daerah dari Papua, Sumatera, dan Sulawesi untuk bersama-sama mengangkat kasus yang menjadi perhatian di masing-masing daerah.



September

- » 7-9 September rapat konsultasi laporan pemantauan di Jakarta yang dihadiri perwakilan wilayah Sumatera, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

November

- » Training of Trainers untuk wilayah tengah di Samarinda dari 30 November-2 Desember diikuti 10 dari 74 pendaftar.

2022



- » 15-16 September HRWG melakukan audiensi dengan Komnas HAM perwakilan Maluku dan Lembaga Pers Mahasiswa IAIN Ambon (LPM Lintas IAIN Ambon) untuk mengkaji kondisi kebebasan pers dan jurnalis di wilayah Maluku serta mekanisme pelaporan kasus pers yang dilakukan oleh Komnas HAM Maluku.
- » 21-22 September, HRWG mengikuti Media Summit 2022 di Bali mewakili Konsorsium Jurnalisme Aman.

Oktober

- » Sosialisasi dan Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM No 5 Tahun 2021 di Papua pada 26 Oktober di Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN VI) di Jayapura, dihadiri 142 peserta.
- » Training of Trainers (TOT) untuk wilayah barat di Yogyakarta pada 19-21 Oktober diikuti 17 dari 174 pendaftar.

Desember

- » Akhir kegiatan peningkatan kapasitas keamanan jurnalis oleh PPMN. Dimulai Juli, 75 jurnalis mengikuti kegiatan ini.



PROGRAM

DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

“Program-program seperti ini bisa diperluas lagi sasaran daerahnya, sehingga lebih bisa dirasakan lagi oleh banyak kalangan.”

Chunainah, pendamping dari unsur masyarakat, Desa Sugihan, Kabupaten Tuban



Tidak sepenuhnya mudah menjalankan program ini. Misalnya sempat disadari bahwa koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat tidak berjalan baik. Di tambah situasi pandemi yang masih berlangsung, hal ini menghambat pencapaian target waktu yang telah direncanakan.

Hal lain adalah tetap dibutuhkannya dukungan politik dari pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memastikan politik anggaran dalam memenuhi SPM difasilitasi secara layak. Harapannya, kata Afrizal, adalah “pemerintah daerah lebih menyadari kewajibannya dalam pemenuhan layanan publik dasar bagi masyarakat”.

Tifa pada akhirnya dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Pelaksanaan program jadi bisa berjalan baik. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM meningkat secara berarti, baik di Tuban dan di Barito Utara. Kelompok masyarakat rentan dan marginal pun termotivasi untuk melibatkan diri.

Tak kalah pentingnya: prinsip kesetaraan dan keadilan yang diterapkan dalam melibatkan masyarakat berhasil menjangkau individu-individu dari berbagai latar belakang, tanpa diskriminasi. ●



antara Agustus-Desember 2021 proses penentuan mitra dilaksanakan. Desa-desa yang menjadi target ditetapkan berada di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Barito Utara.

Tujuan jangka panjang yang mau diwujudkan adalah memastikan DBH-SDA “dapat dimanfaatkan secara efisien untuk memenuhi hak dasar masyarakat marginal melalui peningkatan strategi pencapaian standar pelayanan minimum”.

Serangkaian kegiatan terkait program itu dijalankan mulai Maret 2022. Kegiatan-kegiatan ini meliputi pelatihan, pengenalan hal ihwal DBH, kajian dampak sosial dan lingkungan, sosialisasi peraturan, dan pelatihan untuk membangun kapasitas. Tak ketinggalan Tifa memfasilitasi dialog antara masyarakat dan industri.

Selain itu, Tifa mengampu pelatihan dan implementasi kajian potensi sumber daya alam dan pemetaan digital. Tujuannya adalah “untuk menggambarkan potensi sumber daya alam dan peluang untuk mengembangkan ekonomi dan pasar masyarakat”.

MENGELAKKAN PARADOKS KEBERLIMPAHAN

PARADOKS keberlimpaan atau kutukan sumber daya alam masih berlaku di banyak daerah yang kaya sumber daya alam. Kekayaan itu tidak serta-merta menyejahterakan masyarakat setempat, bahkan setelah ada kegiatan industri yang mengekstraksinya.

Sebenarnya ada dana yang ditransfer ke daerah dari pemerintah pusat yang sumbernya adalah penerimaan dari sumber daya alam—pertambangan minyak bumi dan gas bumi, mineral dan batu bara, panas bumi, kehutanan, dan perikanan. Skema ini disebut Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA). Dibagikan dengan angka persentase tertentu, DBH-SDA ini dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Masalahnya: dana itu sering tidak dimanfaatkan secara efisien, tidak transparan serta tidak akuntabel; kurang terencana dengan baik sehingga luput mengkomodasi

kebutuhan masyarakat marginal; dan sering untuk kegiatan yang tidak membantu memperbaiki kehidupan masyarakat miskin di kawasan yang menjadi lokasi operasi industri ekstraktif.

Salah satu penggunaan yang bisa berguna adalah untuk meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM), khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. “SPM merupakan urusan wajib pemerintah daerah,” kata Afrizal Abdul Rasyid, Project Officer for Budget Advocacy, Yayasan Tifa.

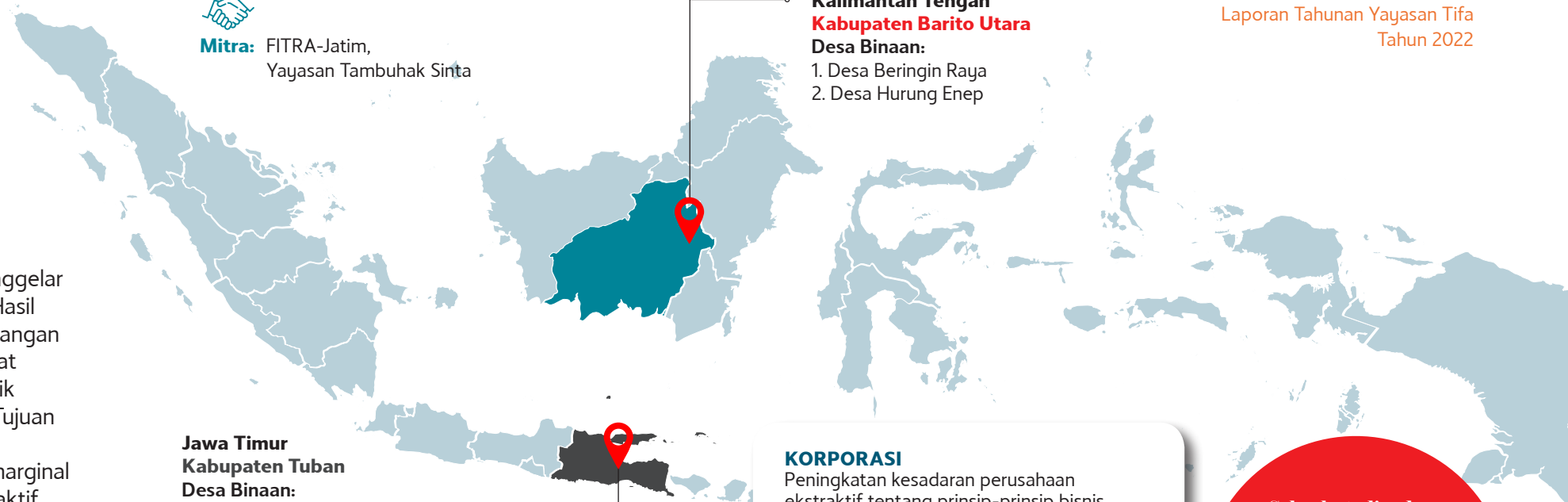
Berkaitan dengan hal itu, dengan dana dari Ford Foundation, Tifa menjalankan program Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk Pengembangan Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Kabupaten. Bersama mitra-mitranya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur dan Yayasan Tambuhak Sinta, Tifa memulainya sejak Agustus 2021—

AGAR TAK CUMA MENONTON

YAYASAN Tifa bersama mitra menggelar program “Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk Pengembangan Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Kabupaten” di dua kabupaten pemilik industri ekstraktif sepanjang 2022. Tujuan program ini adalah untuk “Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat marginal yang terkena dampak industri ekstraktif dengan memperkuat partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya secara berkelanjutan”.



Mitra: FITRA-Jatim, Yayasan Tambuhak Sinta



Kalimantan Tengah
Kabupaten Barito Utara
Desa Binaan:
1. Desa Beringin Raya
2. Desa Hurung Enep

Jawa Timur
Kabupaten Tuban
Desa Binaan:
1. Desa Sugihan
2. Desa Pongpongan
3. Desa Sokosari
4. Desa Sumurcinde

KORPORASI

Peningkatan kesadaran perusahaan ekstraktif tentang prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia, di antaranya melalui perbaikan mekanisme penanganan keluhan yang dikelola oleh perusahaan.

Sebuah studi sedang dilakukan untuk mengukur atau mengevaluasi kepatuhan praktik bisnis dan prinsip-prinsip hak asasi manusia terhadap perusahaan yang beroperasi di program lokasi.



CAPAIAN

MASYARAKAT

- » 120 warga
- » 6 desa
- » 18 perangkat desa
- » Staf Fitra dan YTS

Pindai QR code di bawah untuk informasi selengkapnya



(tidak perlu koneksi internet)

PEMERINTAH

- » 60 Tim Pelaksana SPM Tuban dan Barito Utara
- » Rencana aksi Pelaksanaan SPM
- » Mini CLAP dan Photovoice
- » Tim Pelaksana SPM terbaik secara nasional

Pindai QR code di bawah untuk informasi selengkapnya



(tidak perlu koneksi internet)

BUKU

- » Kertas Kebijakan Optimalisasi Dana
- » Transfer ke Desa untuk Pemenuhan
- » Standar Pelayanan Minimal Melalui
- » Reformasi ADD di Kabupaten Tuban.

Ingin membaca? Pindai QR code ini

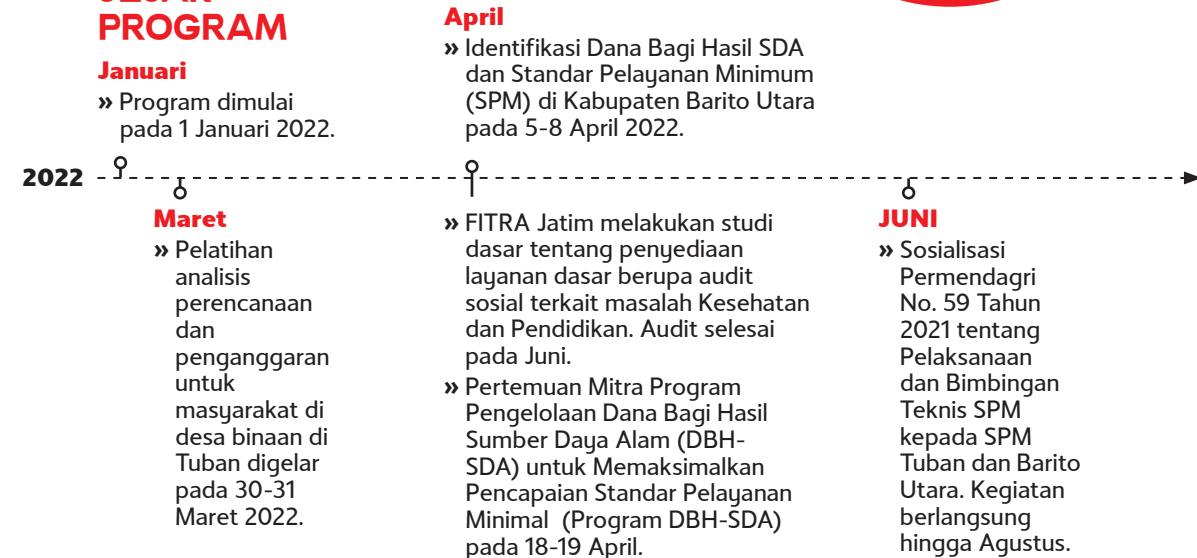


(perlu koneksi internet)



<https://www.tifafoundation.id/buku/optimalisasi-dana-transfer-ke-desa-untuk-pemenuhan-standar-pelayanan-minimal-spm-melalui-reformasi-add-di-kabupaten-tuban/>

JEJAK PROGRAM



Juli

- » Hasil audit sosial oleh FITRA Jatim di Tuban disampaikan ke Bina Bangsa Kemendagri dan SPM Tuban.
- » Peningkatan kapasitas masyarakat tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan di Barito Utara.

Agustus

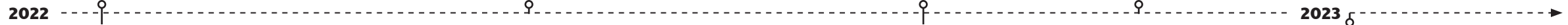
- » Warga desa binaan di Barito Utara melakukan analisis tentang penyediaan layanan dasar menggunakan Mini-CLAP.

Oktober

- » Pelatihan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) serta kegiatan penilaian dampak sosial dan lingkungan di Tuban dan Barito Utara.

November

- » Pelatihan dan implementasi pemetaan digital di Tuban dan Barito Utara. Kegiatan berlangsung hingga Desember.
- » Pelatihan dan pendampingan kepada SPM Barito Utara untuk menyusun Rencana Aksi dan integrasi dalam RPJMD.



- » Diskusi publik di Tuban dan Barito Utara untuk mensosialisasikan potensi sumber daya alam di sekitar industri ekstraktif. Kegiatan berlangsung hingga Desember.

- » Rencana dialog masyarakat yang terkena dampak industri ekstraktif dengan pemerintah daerah.
- » Studi kepatuhan praktik bisnis dan prinsip-prinsip hak asasi manusia terhadap perusahaan yang beroperasi di lokasi program.

PROGRAM

REVIEW

“Program ini menawarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Proses pelibatan warga biasa itu, lo. Ternyata, jika diberi ruang dan kebebasan bicara, mereka sangat aktif. Partisipan yang diundang acak malah aktif bicara dan bersedia juga terlibat.”

Titik Istiwatun,
Lurah Sriharjo, Kecamatan
Imogiri, Kabupaten Bantul



MENEMUKAN NOKTAH HILANG DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK



SALAH satu persoalan dalam pembangunan di Indonesia adalah absennya partisipasi publik pada tahap evaluasi pembangunan. Evaluasi pembangunan banyak dikerjakan sebatas untuk memenuhi syarat administrasi, atau bahkan masih jarang dilaksanakan. Hal ini terjadi berjenjang. Tidak saja di pusat, melainkan juga di provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Ibarat gambar bergaya *pixelate* atau pola titik-titik, ada noktah yang hilang.

Sejak 2020, Yayasan Tifa telah mengupayakan inisiasi untuk menyalakan noktah itu. Secara khusus, fokusnya pada tahapan dan proses evaluasi pembangunan di level desa. Inisiatif Tifa mendapat sambutan baik sejumlah pihak—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Open Government Indonesia di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejak pertengahan 2021, Tifa memperkenalkan Program Review kepada publik.

Program Review mengadaptasi pendekatan "sortir program" yang dikembangkan dan diimplementasikan

di Jepang selama 20 tahun terakhir. Di sana, pemerintah di berbagai level melibatkan masyarakat sebagai penilai untuk mengevaluasi program-program mereka. Program Review yang diperkenalkan di Indonesia tidak serta-merta meniru persis apa yang dilakukan di Jepang. Ada berbagai penyesuaian, karena sistem administrasi, politik, pola, dan mekanisme kerja birokrasi, serta karakter masyarakat yang berbeda.

Didanai Kementerian Luar Negeri Jepang melalui Official Development Assistance (ODA), program ini didesain untuk membangun proses evaluasi pembangunan yang akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan warga secara langsung sebagai pengambil keputusan atas keberlanjutan program pemerintah.

Ada dua desa (atau di Yogyakarta disebut kalurahan) yang menjadi *pilot partners*: Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo di Kabupaten Bantul. Keduanya dipilih melalui proses seleksi dan diskusi panjang, melibatkan mitra lokal, Atmawidya Alterasi Indonesia (Alterasi). Selain pemahaman aparat

desa dan warga akan pentingnya proses pembangunan yang transparan dan akuntabel, komitmen bagi kelanjutan program menjadi pertimbangan utama.

Pelan namun pasti, Panitia Pelaksana Program Preview bisa dibentuk di Sriharjo dan Guwosari. Panitia ini terdiri atas perwakilan pemerintah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Dari sekitar 15 aparat pemerintah kalurahan dan anggota Bamuskal, dipilih tujuh orang sebagai Panitia Pelaksana. Kinerja merekalah yang menentukan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Program Review.

Ada dua kegiatan di tiap kalurahan yang disepakati bersama untuk dievaluasi melalui uji coba Program Review. Kedua program ini adalah program kesehatan berupa pemberian makanan tambahan bagi balita dan program kesejahteraan rakyat berupa renovasi rumah tidak layak huni.

Sepanjang awal 2022, Panitia Pelaksana di tiap kalurahan bekerja mempersiapkan uji coba Program Review. Pembekalan, pemantapan fungsi, dan pendampingan kerja Panitia

Pelaksana juga dilakukan simultan.

Uji coba Program Review dilaksanakan di Kalurahan Guwosari pada 20 Mei 2022 dan di Kalurahan Sriharjo pada 2022. Uji coba di masing-masing kalurahan ini menghadirkan 30 warga penilai yang dipilih secara acak dari unsur masyarakat, empat evaluator yang berasal dari luar wilayah desa yang bertugas memperdalam dan mengkonfirmasi informasi yang disampaikan pengampu program, serta moderator yang berperan memandu jalannya diskusi.

Warga penilai merupakan perwakilan masyarakat. Pemilihan mereka secara acak dilakukan demi menjamin kesempatan yang sama bagi semua warga untuk menjadi penilai. Selain itu, dengan cara ini bisa didapat penilai dengan latar belakang yang beragam menurut aspek usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Dengan begitu, obyektivitas bisa dipenuhi dan bias diminimalkan.

"Awalnya *sih* pesimis, apa bisa warga yang diundang ini bersedia datang dan berani bicara," kata Titik Istiwatun, Lurah Sriharjo, mewakili apa yang dipikirkan aparat pemerintah desa waktu itu.

Dalam pelaksanaannya, warga desa yang menjadi warga penilai malah tergolong yang aktif terlibat. Tidak hanya hadir saat uji coba Program Review, mereka juga menanyakan

perkembangan program sesuai direviu.

Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo masing-masing berkomitmen untuk melaksanakan Program Review di tahun mendatang. Komitmen ini lahir dari observasi dan manfaat yang diperoleh dari uji coba yang dilakukan pada tahun 2022. Pada akhir 2022 pula, Bamuskal dan pemerintah kalurahan masing-masing desa menggodok peraturan tingkat desa untuk penyelenggaraan Program Review.

Program Review setidaknya sudah mengirim sinyal kuat bahwa partisipasi warga, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pada tahapan evaluasi program pembangunan, ternyata dapat diwujudkan. Dan ini harus didorong. ●

PARTISIPASI PENGELOLAAN KEGIATAN DESA

SETELAH memperkenalkan Program Review pada fase pertama (Maret 2020-Juni 2021), pada Juli 2021 hingga September 2022 Program Review memasuki tahap uji coba di tingkat desa. Demi transparansi dan akuntabilitas.



CAPAIAN

2 Kegiatan:

1. Kesehatan (Makanan Bergizi bagi Balita)
2. Kesejahteraan Rakyat (Renovasi Rumah Tidak Layak Huni)



Mitra: Kementerian Luar Negeri
Pemerintah Jepang, Japan Initiative,
Alterasi Indonesia



Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Kalurahan Guwosari, Bantul
 2. Kalurahan Sriharjo, Bantul
- Periode: Juli 2021–September 2022

- 2 Kalurahan Pilot Program
- 2 Tim Panitia Pelaksana @ 7 orang per desa
- 2 Tim Penilai @ 15 orang per desa
- 2 Tim Evaluator @ 3 orang per desa

JEJAK PROGRAM

Juli

» Program Review fase 2 dimulai.

2021

» Wabah Covid-19 kembali memuncak, berlangsung hingga September 2021.

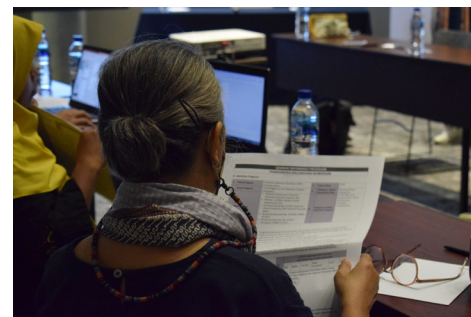
Agustus

» Penetapan partner yakni Alterasi dan lokasi kegiatan di Guwosari dan Sriharjo, Bantul.

» 30-31 Agustus workshop pertama secara *online*.

September

» *Kickoff* meeting external secara *online* pada 29 September 2021.



Oktober

» Yayasan Tifa and Alterasi mulai menggelar kegiatan luring di kedua desa.

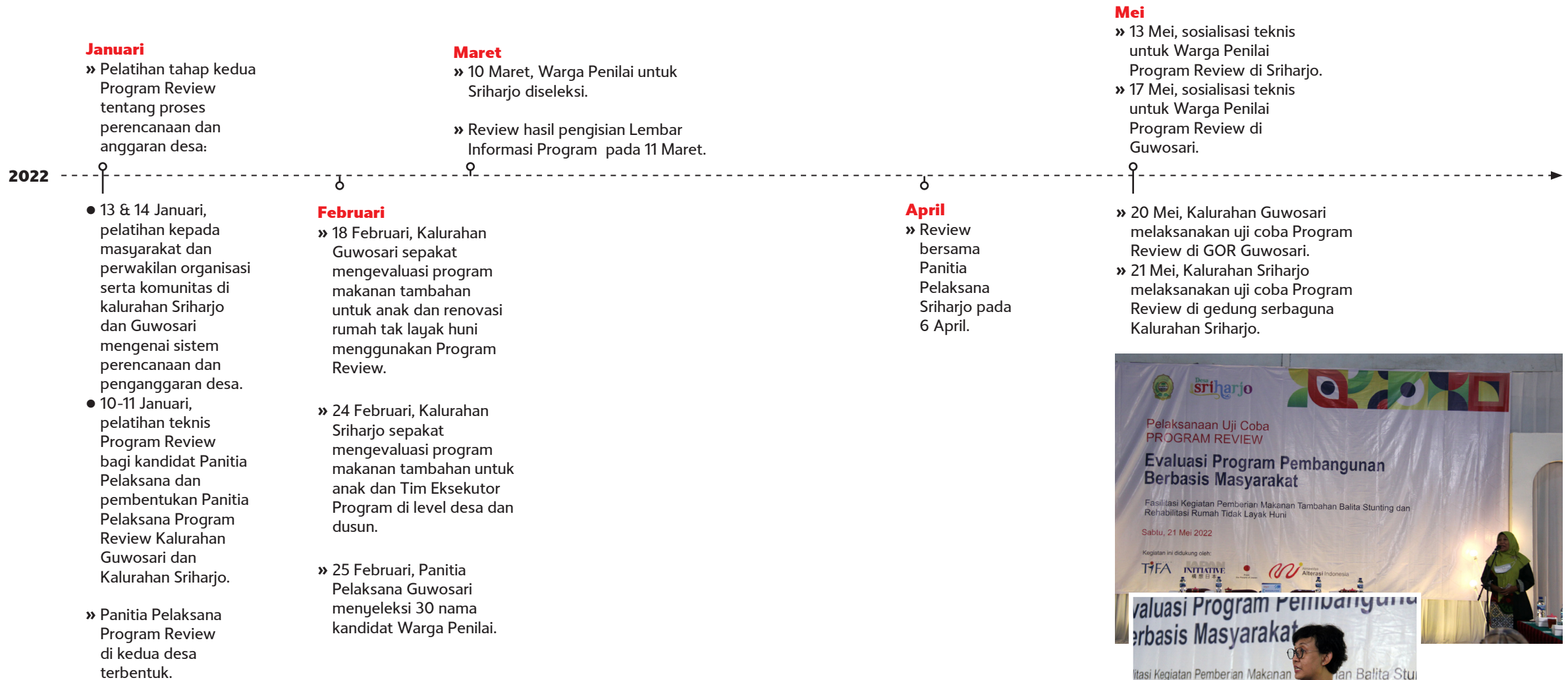
» Pertemuan koordinasi dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan BAPPENAS.

November

» Pelatihan Program Review kepada 20-25 perangkat desa, anggota BPD, dan asisten desa.

» Pelatihan Program Review kepada 15 anggota komunitas dan organisasi dan 15 masyarakat umum.

» Program memperkenalkan adanya "Warga Penilai".



Juni

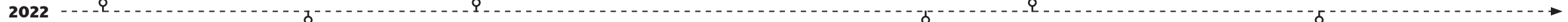
- » 16 & 17 Juni, evaluasi pelaksanaan uji coba Program Review bersama panitia pelaksana dan pemerintah kalurahan di Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo.
- » Evaluasi dengan Warga Penilai di dua desa.

Agustus

- » 25 Agustus, sharing session dan lesson learned dari uji coba Program Reveiw dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, BAPPENAS, dan perwakilan CSO di Jakarta

November

- » 14 November, perwakilan Yayasan Tifa, AAI, dan BAPPEDA Kabupaten Bantul melakukan audiensi dengan Bupati Bantul mengenai rencana uji coba Program Review.
- » 17 November, sosialisasi/perkenalan mengenai Program Review kepada kepala/pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.



Juli

- » 26 Juli, seminar diseminasi hasil dan pembelajaran dari proses uji coba Program Review di dua kalurahan bersama pemerintah kabupaten, provinsi, dan organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta.



Oktober



- » 10-11 Oktober, annual meeting dan kickoff Program Review tahun ketiga. Kegiatan dilaksanakan di Yogyakarta dengan melibatkan organisasi mitra AAI, BAPPEDA Bantul, perwakilan Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL Guwosari dan Sriharjo.
- » 20-24 Oktober, perwakilan dari Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Sriharjo, serta perwakilan Panitia Pelaksana Kalurahan Guwosari dan Sriharjo melakukan kunjungan belajar singkat mengenai Program Review ke Jepang, khususnya Kota Tokyo dan Nara.

Desember

- » 28 Desember, sesi penjelasan pendalaman Program Review kepada staf program OPD Pemda Kabupaten Bantul.



PROGRAM

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA DATA

EKOSISTEM DIGITAL BAIK, DEMOKRASI BERMUTU

RESTRIKSI terhadap kebebasan digital berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pemenuhan hak asasi manusia, juga manifestasinya dalam wujud partisipasi seseorang dalam proses demokrasi. Karenanya, hak untuk ikut serta itu harus dilindungi.

Sebagian problem urgen dalam konteks itu adalah tidak adanya jaminan perlindungan terhadap data pribadi dan aktivisme digital. Mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam ekosistem digital jadi penting dalam hal ini.

Melalui pendanaan Packard Foundation, Yayasan Tifa meluncurkan program Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Pemajuan Prinsip-prinsip HAM dalam Ekosistem Digital untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tifa bermitra dengan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Mulai dilaksanakan menjelang akhir 2021, program ini akan selesai pada 2023.

Menurut Debora Irene Christine, Project Manager Tifa untuk Data Policy and Governance, ada dua capaian yang dibidik melalui program ini:



tersedianya pengetahuan tentang lanskap perlindungan data pribadi bagi masyarakat sipil agar bisa berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan tata kelola data serta mempraktikkan perlindungan data pribadi di lembaga-lembaga masyarakat sipil; dan memperkuat peran Tifa sebagai kurator pengetahuan terkini tentang lanskap aktivisme digital agar dapat memfasilitasi diskusi kritis antarkelompok masyarakat sipil perihal arah strategis aktivisme digital di Indonesia.

Sejak pertengahan 2022, menyangkut capaian pertama, Tifa menginisiasi upaya perlindungan data pribadi melalui riset yang menghasilkan produk pengetahuan. Tiga topik yang diteliti adalah bentuk koordinasi antara otoritas perlindungan data pribadi dan kementerian serta lembaga, skema pengendalian data bersama di Indonesia, dan transfer data lintas yurisdiksi. Laporan dan rekomendasi hasil riset ini akan menjadi bahan diskusi dengan kelompok masyarakat sipil, pemerintah, dan aktor privat guna membantu persiapan implementasi perlindungan data pribadi yang efektif

pelatihan bagi 60 advokat publik. Selain itu, Tifa mendistribusikan produk-produk pengetahuan yang diproduksinya ke jaringan internasional.

Untuk capaian kedua, demi mengkurasi pengetahuan mengenai lanskap terkini aktivisme digital di Indonesia, Tifa melakukan penelitian yang memetakan tren, ekosistem, tantangan, dan peluang aktivisme digital, serta profil kelompok masyarakat sipil pelaku aktivisme digital. Pelaksanaannya dibantu sebuah tim peneliti. Data dihimpun dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif meliputi studi kasus, yang fokusnya adalah kampanye #SahkanRUUPKS, #BaliTolakReklamasi, dan #PapuaLivesMatter.

Sebagai kelanjutan dari penelitian tersebut, Tifa akan menyosialisasikan temuan dan rekomendasi hasil penelitian; mengembangkan modul peningkatan kapasitas dalam advokasi dan kampanye digital; meningkatkan kapasitas advokasi dan kampanye digital bagi OMS dan aktivis kelompok muda; dan menyelenggarakan diskusi berkala.

Sejumlah tantangan mewarnai pelaksanaan kegiatan sepanjang 2022. Tantangan-tantangan ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia, belum lengkapnya pemahaman atas isu, dan manajemen waktu, yang menjadi bagian dari pembelajaran dalam implementasi program. Tantangan lain yang ditemukan di lapangan adalah isu perlindungan data pribadi masih didominasi perspektif maskulin, yang membuat peserta dan pemangku hak yang terlibat di dalam kegiatan cukup kesulitan memahami irisan perlindungan data pribadi dengan prinsip kesetaraan gender, keberagaman, dan inklusi sosial (GEDSI).

Tidak kalah pentingnya: saat proses penyusunan modul advokasi kasus pelanggaran perlindungan data berlangsung, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan. Bersama Koalisi Advokasi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Tifa berperan dalam mendorong pengesahannya.

Dengan berakhirnya periode 2022, terlepas dari berbagai tantangan tersebut, beberapa hal bisa dicapai dalam implementasi program. Sebagian yang lain masih harus dilanjutkan pada tahun berikutnya agar bisa mencapai tujuannya—kualitas demokrasi yang lebih baik, yang menghormati prinsip-prinsip HAM, melalui pengaturan dan praktik tata kelola ekosistem data dan teknologi digital yang baik. ●

Acakadut Tata Kelola Data Kesehatan dan Pendidikan

PADA masa pandemi Covid-19, kesenjangan antara pengaturan dan praktik tata kelola data di sektor publik dengan kebutuhan penyediaan layanan publik jadi gamblang terlihat. Di tengah eskalasi transformasi digital di sektor pelayanan publik yang didorong oleh pandemi, tata kelola data yang baik menjadi faktor penentu kualitas dan efektivitas layanan bagi masyarakat.

Ketersediaan data yang tak memadai, atau bahkan kesengajaan untuk menutupi data, merupakan kritik utama kepada pemerintah sejak kondisi pandemi di Indonesia diakui resmi pada Maret 2020. Data yang acakadut ini bukan saja terkait penanggulangan pandemi, melainkan juga yang bersangkutan-paut dengan respon untuk membantu kalangan yang secara ekonomi terdampak.

Di sektor pendidikan, misalnya, ada dugaan penyalahgunaan data perorangan tenaga pengajar honorer penerima Bantuan Subsidi Upah. Di sektor kesehatan, beban kerja ganda tenaga kesehatan yang harus melaksanakan fungsi administratif tata kelola data di samping tugas utama mereka memberikan

pelayanan kesehatan adalah salah satu faktor utama penyebab belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola data dalam penanggulangan pandemi.

Persoalan-persoalan tersebut terjadi walau sebenarnya telah ada regulasi yang mengatur standar tata kelola data di sektor publik. Dengan latar belakang inilah program Tata Kelola Data di Sektor Kesehatan dan Pendidikan pada Masa Covid-19 dan Impaknya bagi Penyelenggaraan Layanan Publik dilaksanakan. Tujuannya: mendapatkan gambaran tentang tantangan yang ada dalam tata kelola data di sektor publik di Indonesia dan bagaimana hal itu menghambat penyediaan layanan bagi masyarakat.

Didukung pendanaan dari Luminare, fokus kegiatan dalam program yang dimulai pada November 2020 hingga Juni 2022 ini adalah riset dan advokasi kebijakan. Riset, yang dilakukan Centre for Innovation Policy and Governance, bertujuan memotret tata kelola data di sektor pendidikan dan kesehatan dalam merespon pandemi.

Menggunakan temuan penelitian



Lokakarya Upaya Litigasi dan Non Litigasi Penanganan Sengketa Pelindungan Data Pribadi.

dan rekomendasi yang dihasilkan, program ini menyelenggarakan serangkaian dialog dengan para pemangku kepentingan tata kelola data di sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk dengan

komunitas teknis, pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi dan memberikan pendampingan bagi pemangku hak di sektor pendidikan dan kesehatan, serta kelompok masyarakat sipil yang meluncurkan inisiatif urun daya dalam penyediaan data selama masa pandemi.

Program lanjutan yang memperkuat capaian program ini diperlukan. ●

AGAR TERLINDUNG DI DUNIA MAYA

MELALUI proyek bertajuk "Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pemajuan prinsip-prinsip HAM dalam ekosistem teknologi digital", Yayasan Tifa menggelar program peningkatan perlindungan data pribadi untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) serta kelompok rentan dan marginal.



Mitra:
LBH Pers

CAPAIAN

130

Peserta dalam webinar laporan penelitian PDP

3

Kajian kebijakan perlindungan data, keamanan, prosedur-prosedur operasional standar, pemantauan, serta dampaknya dalam konteks masyarakat sipil yang lebih luas



JEJAK PROGRAM

Februari

» Yayasan Tifa melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas litigasi sengketa perlindungan data untuk 20 advokat dari Sumatera dan Jawa di Jakarta pada 21-23 Februari.

Mei

» Yayasan Tifa bersama tim peneliti melakukan penelitian "Peran Aktivisme Digital Organisasi Gerakan Sosial di Indonesia (2016-2021)" yang berlangsung hingga Desember 2022.

Juni

» Tifa bersama LBH Pers mengembangkan modul untuk menjawab kebutuhan peningkatan pengetahuan serta partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam mendorong terbentuknya kebijakan tata kelola data yang transparan dan akuntabel. Penyusunan modul berlangsung hingga Desember.

» Diseminasi hasil kajian pada sedikitnya 30 OMS dan pemangku kepentingan untuk memastikan hasil penelitian dapat tersampaikan kepada para pemangku kepentingan seperti OMS, pembuat kebijakan, dan pelaku industri yang relevan.

September

» Yayasan Tifa melakukan penelitian mengenai minimnya koordinasi dan kolaborasi antar K/L lintas sektor di dalam konteks tata kelola digital dan data.

Oktober

» Bekerjasama dengan Institute of Public Policy Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Yayasan Tifa melakukan penelitian "Skema Pengendali Gabungan di Indonesia". Pemicunya adalah minimnya pengaturan mengenai *joint controller* dalam UU PDP dan perbedaan konteks tata kelola data pribadi di Indonesia.

Desember

» Rencana aksi Open Government Indonesia (OGI) yang disusun oleh Tifa disepakati bersama Kominfo untuk diimplementasikan pada 2023-2024.

Desember-Januari 2023

» Yayasan Tifa menggelar survei terhadap 53 OMS se-Indonesia, wawancara dengan 6 OMS, dan observasi 4 OMS untuk melihat postur keamanan holistik mereka bagi pengembangan modul perlindungan data pribadi untuk OMS.

PROGRAM

STRATEGIC PARTNERSHIP



PARA MITRA LEWAT DUA SKEMA

SEBAGAI organisasi yang mulanya hanya menjalankan fungsi penyaluran dana (*grantmaking*), Yayasan Tifa juga masih melakukannya. Pada 2022, melalui jalur *Call for Proposal*, Tifa membuka kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memerlukan pendanaan untuk kegiatannya. Selain itu, ada pula yang dialokasikan melalui skema *Strategic Partnership*. Program-program dari OMS yang mendapatkan dana dilaksanakan pada 2023.

- PENERIMA SKEMA CALL FOR PROPOSAL
- PENERIMA SKEMA STRATEGIC PARTNERSHIP



1
Nama Organisasi:
The Indonesian Institute

Judul Program:
Studi dan Advokasi Kebijakan tentang Penataan Kampanye Politik di Media Sosial untuk Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang Informatif dan Edukatif

2
Nama Organisasi:
PUSAD Paramadina

Judul Program:
Penguatan Kapasitas Aktor Komunitas Melawan Hasutan/ Pelintiran Kebencian Menjelang Pemilu 2024

3
Nama Organisasi:
AKAR Foundation

Judul Program:
Mendorong Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong Berbasis Agroekologi dan *Food Security System*

4
Nama Organisasi:
Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan (HUMANUM)

Judul Program:
Penguatan Kapasitas Masyarakat Rentan untuk Adaptasi dan Ketangguhan terhadap Dampak Perubahan Iklim di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah

5
Nama Organisasi:
PR2 Media

Judul Program:
Pengaturan Moderasi Konten Berbahaya dan Ilegal di Media Sosial di Indonesia: Riset dan Advokasi Kebijakan

6
Nama Organisasi:
Institute for Criminal Justice Forum (ICJR)

Judul Program:
Penguatan Partisipasi Masyarakat Sipil untuk Memperjuangkan Hak Atas Kebebasan Sipil dalam Pembahasan RKUHP dan Revisi UU ITE.

7
Nama Organisasi:
Indonesian Parliamentary Centre (IPC)

Judul Program:
Penguatan Keterbukaan Parlemen untuk Partisipasi Bermakna

8
Nama Organisasi:
JERAT Papua

Judul Program:
Membangun Manajemen Pembela HAM di Tanah Papua

9
Nama Organisasi:
KontraS Aceh

Judul Program:
Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu melalui Mekanisme Reparasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

10
Nama Organisasi:
Indonesia untuk Kemanusiaan

Judul Program:
Mendorong Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu melalui Mekanisme Pengungkapan Kebenaran untuk Pemulihan Korban

11
Nama Organisasi:
Papuan Voices

Judul Program:
Tutur dari Ufuk Timur melalui Audio Visual

12
Nama Organisasi:
Koliasi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)

Judul Program:
Demokratisasi Pengelolaan Air Bawah

13 14
Nama Organisasi:
LBH Semarang dan LBH Padang

Judul Program:
Wujudkan Pengadilan Inklusif bagi Perempuan di Semarang dan Padang

15
Nama Organisasi:
LBH Jakarta

Judul Program:
Litigasi Strategis untuk Mendorong Pencabutan/ Perubahan Permenkominfo No. 5 tahun 2020

16
Nama Organisasi:
Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)

Judul Program:
Penguatan Implementasi Komitmen OGI Isu Keadilan dan Bantuan Hukum

17
Nama Organisasi:
Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari (LBP3BH)

Judul Program:
Advokasi Kelembagaan Masyarakat Sipil sebagai Konstituen dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua di Papua Barat

18
Nama Organisasi:
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Judul Program:
Penguatan Daya Lenting Komunitas Darim dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim untuk Mencapai Kehidupan yang Sejahtera

19
Nama Organisasi:
Yayasan Pulih Aceh

Judul Program:
Penguatan Kapasitas Program Penguatan dan Pemulihan Psikososial terhadap Penyintas Konflik di Aceh Besar untuk KKR Aceh

MELUASKAN JANGKAUAN DARI RANAH MAYA

SEPERTI siapa saja pada masa pandemi, Yayasan Tifa juga harus beradaptasi dalam cara berkomunikasi. Hal ini termasuk bagaimana memastikan para pemangku kepentingan tetap mendapatkan informasi dan pengetahuan yang bersangkutan paut dengan Tifa—tentang kegiatan, program, hasil riset, penerbitan buku, *call for proposal*, dan lain-lain.



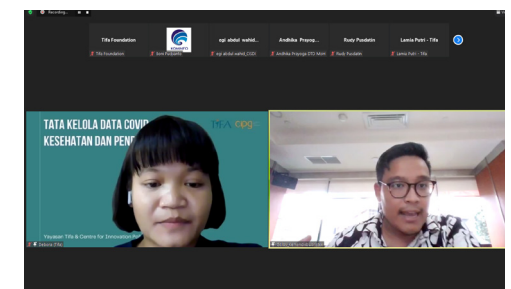
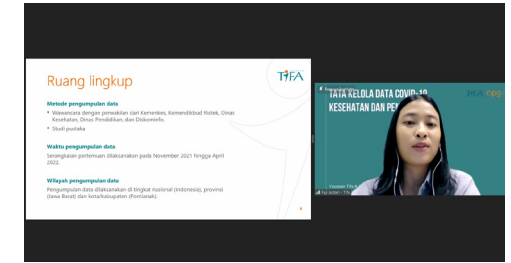
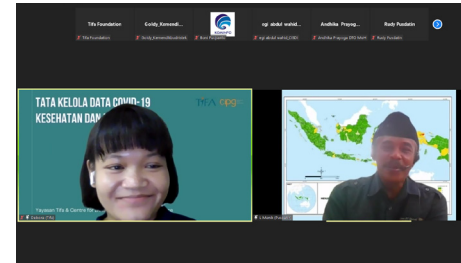
Mengkomunikasikan hal-hal itu, bagaimanapun, tidak bisa dihindarkan. Tifa memang bukan organisasi yang mencari laba. Tapi ia tetap merupakan usaha yang menjalankan proyek, mengelola anggaran, menghadapi realitas, dan mengerahkan orang-orang yang bisa terpengaruh perubahan politik, ekonomi, lingkungan hidup, iklim. Dan pasti di dalamnya termasuk pandemi, yang terjadi pada tataran global.

Memilih lebih banyak memanfaatkan media sosial jadi tak terhindarkan. Ini opsi di luar saluran-saluran ranah maya lain yang sudah lazim, seperti email dan halaman web. Media sosial memang telah dicemari eksekusi dari fenomena *post-fact* dan *post-truth*,

●●●
Peluncuran Policy Paper.

yang menjadikan sebagian dari publik lebih mudah mempercayai hal-hal yang menyentuh emosi dan kepercayaannya ketimbang fakta. Meski demikian, media sosial masih mengandung sisi baiknya, untuk berkomunikasi dua arah, menggalang partisipasi dan keterlibatan, maupun sekadar mendiseminasikan informasi dan pengetahuan.

Setelah pandemi mereda, pada 2022, Tifa tidak serta-merta meninggalkan pemanfaatan media sosial itu, atau mengembalikan kondisinya seperti pada masa sebelumnya. Timbul



keyakinan yang bertambah kuat bahwa, dengan strategi yang baik, media sosial bisa ikut menjalankan peran penting sebagai medium yang mampu melibatkan publik dalam mengangkat isu-isu yang merupakan fokus Tifa.

Sementara audit untuk kebutuhan dan penyusunan strategi sedang dilakukan, Tifa mengeset dua sasaran utama dari pemanfaatan media sosial: meluaskan jangkauan pengikut (*follower*) dan meningkatkan target advokasi. Untuk itu diperlukan peningkatan produksi konten dan konsolidasi dengan pengelola program. Tentang produksi konten, Brigita Rumung, Knowledge Management and Communication

Officer Tifa, mengatakan jumlahnya “bisa beragam, tergantung *event*”. Tapi dari awal diset dalam sepekan minimal ada dua. Dari sisi teknis produksi, sudah ada staf yang terampil memproduksi konten dari aspek visual yang direkrut setahun sebelumnya.

Maka, tahun lalu, ketika perlahan-lahan pandemi berlalu dan akibat dari efeknya juga sedikit demi sedikit kembali pulih, Tifa bisa menyatakan telah menemukan cara untuk menyesuaikan diri dari sisi komunikasi dan manajemen pengetahuan. Dalam jangka pendek kami telah yakin dengan pencapaian untuk jangka waktu itu. Dalam jangka panjang kami optimistis menghadapi masa depan. ●

Harapan untuk Tifa

PERWAKILAN PEMERINTAH

Maharani Putri Samsu Wibowo

Indonesia Point
of Contact for
Open Government
Partnership

Koordinator
Bidang
Kelembagaan dan
Kapasitas ASN
Kementerian PPN/
Bappenas

“TIFA telah menjadi salah satu mitra aktif Open Government Indonesia sejak 2020, melalui partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan keterbukaan pemerintah. Pada awalnya Tifa terlibat dalam penyusunan dan implementasi komitmen mengenai Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang akhirnya dimuat dan diimplementasikan melalui Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) VI pada 2020-2022. Pascakomitmen itu, Tifa kini turut mendorong komitmen keterbukaan pemerintah di isu strategis akses keadilan serta ruang kewargaan dan demokrasi melalui RAN OGI VII pada 2023-2024.

“Selain berkontribusi dalam penyusunan dan implementasi RAN OGI, Tifa aktif mempromosikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusi untuk pelayanan publik yang lebih baik melalui program-program yang dijalankannya serta memberikan masukan terkait perbaikan yang dapat dituju oleh pemerintah dan masyarakat secara ko-kreasi. Harapannya, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia dan Tifa dapat terus berkolaborasi dan juga bersama-sama mengarusutamakan nilai-nilai keterbukaan pemerintah di Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, masyarakat yang lebih partisipatif, dan layanan publik yang lebih berkualitas.” ●



PERWAKILAN TOKOH

Jacklevyn Frits Manuputty

Pegiat Isu
Perdamaian Umat
Beragama

SELAMA lebih dari dua dekade Yayasan Tifa meneguhkan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam penguatan masyarakat sipil di Indonesia, untuk menuju masyarakat yang menjunjung kebinekaan, keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan. Jejak kontribusi Tifa ada pada ratusan lembaga di berbagai provinsi, mitra-mitranya dalam berjejaring untuk mempelajari geliat demokrasi di Indonesia.

Meski demikian, tantangannya masih sangat berat. Era keterbukaan informasi saat ini terasa tak sebanding dengan sikap masyarakat yang semakin tidak toleran, di tengah kesenjangan sosial dan ekonomi yang meluas. Suburnya populisme dan politisasi identitas dalam satu dekade terakhir mengoyak tenun kebangsaan dan melemahkan keguyuban kita sebagai bangsa. Kondisi demokrasi pun masih terpasung pada model demokrasi prosedural, belum menjadi demokrasi substansial yang dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Tantangan multiaspek ini diperberat dengan disrupsi akibat transformasi digital yang berlangsung cepat dan masif dalam berbagai aspek kehidupan, yang melampaui daya adaptasi masyarakat.

Di tengah semua tantangan ini, signifikansi kehadiran Tifa sangat diperlukan, melalui pemikiran-pemikiran strategis guna menanggulangi beragam krisis kebangsaan. Lumbung pengetahuan Tifa, ditopang kekuatan jaringan mitra di seluruh Indonesia, menantang Tifa untuk merumuskan dan menawarkan solusi cerdas dan konstruktif bagi pembuatan kebijakan publik di bidang-bidang yang menjadi konsentrasi Tifa. Perluasan jejajah Tifa saat ini ke dunia transformasi digital dan cyber security memperlihatkan keseriusan Tifa untuk mengakselerasi kapasitas adaptasinya, sekaligus memperluas pengetahuannya, yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan kiwari di era paradigma digital.

Pasang surut perjalanan selama ini telah mengukuhkan integritas Tifa. Untuk semua capaiannya, Yayasan Tifa dan jaringan mitranya dipercaya akan tetap kukuh melangkah dan berkontribusi dalam proses demokratisasi di negeri ini. ●



PERWAKILAN MITRA

Ade Wahyudin
Direktur Eksekutif
LBH Pers

“**LBH** Pers merupakan mitra kerja Yayasan Tifa dalam mewujudkan masyarakat yang terbuka. Salah satu kerja sama LBH Pers dengan Yayasan Tifa saat ini adalah pengembangan kapasitas pengacara bantuan hukum terkait pemahaman perlindungan data pribadi.

“Pengacara bantuan hukum adalah aktor penting dalam mengembangkan diskursus perlindungan data pribadi Indonesia. Pengacara yang memahami perlindungan data pribadi secara utuh diharapkan mampu menciptakan landasan-landasan hukum melalui diskursus di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan banyaknya contoh dan praktik terbaik dalam penanganan kasus-kasus data pribadi, diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung masyarakat demokrasi. Di sisi lain, dengan memahami perlindungan data pribadi, para pengacara bantuan hukum dapat mengawasi kekuasaan agar tidak ‘ugal-ugalan’ karena menyembunyikan keterbukaan informasi di balik UU PDP.

“Harapan untuk Yayasan Tifa, jalan menuju keterbukaan tidaklah mudah. Saat ini masyarakat sedang bertubi-tubi ‘dihajar’ regulasi-regulasi yang mencoba menutup keterbukaan yang ada. Bantuan hukum dengan makna struktural adalah sektor strategis dalam mengawal serta menjaga keterbukaan informasi atau bahkan upaya mengembangkan keterbukaan informasi.” ●



PERWAKILAN MITRA

Azharul Husna
Koordinator
KontraS Aceh
2022-2026

“**PERDAMAIAN** Aceh pasca-15 Agustus 2005 tak serta-merta membawakan hak-hak korban pelanggaran HAM, baik hak atas kebenaran maupun keadilan. Sebaliknya, upaya penyelesaian melalui mekanisme yudisial maupun nonyudisial masih harus terus diperjuangkan. Upaya impunitas oleh negara hadir dalam legitimasi berupa peraturan dan gagalnya komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) di tingkat nasional. Pemerintah enggan menyelenggarakan peradilan dan adanya KKR.

“KKR Aceh sendiri terbentuk setelah 11 tahun perdamaian. Organisasi masyarakat sipil terus bekerja, berjuang, mendorong kedua mekanisme hadir dalam upaya pemenuhan hak korban.

“Berdasarkan pengalaman KontraS Aceh, dalam hal penguatan masyarakat sipil serta kerja-kerja keadilan transisi di Aceh, Yayasan Tifa telah memberi sokongan bernilai bagi kerja-kerja ini dalam posisi memberi peluang uji konsep pengungkapan kebenaran, reparasi, maupun rekonsiliasi dalam ruang tarung kenyataan.

“Hal ini menjadi sejarah dalam pergerakan kerja keadilan transisi di daerah pascakonflik untuk dapat dilihat dan dijadikan pembelajaran, baik progres, proses, maupun hasilnya.” ●



18 Office Park Lt. 15C-D,
Jl. T.B. Simatupang No. 18
Kebagusan – Pasar Minggu
Jakarta 12520
Telp. +62 (21) 2270-1427
Fax. +62 (21) 2270-1427
Email: public@tifafoundation.id
www.tifafoundation.id

Surat Pernyataan Manajemen
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Yayasan TIFA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama	: Oslan Purba	1. Name	: Oslan Purba
Alamat Kantor	: 18 Office Park, Lt. 15 / C-D Jl TB Simatupang No 18	Office Address	: 18 Office Park, Lt. 15 / C-D Jl TB Simatupang No 18
Alamat Domisili (sesuai KTP)	: Jl Bunga Asoka GG Andalas no 9	Residential Address	: Jl Bunga Asoka GG Andalas no 9
Telepon	: 021-2270 1427	Telephone	: 021-2270 1427
Jabatan	: Direktur Eksekutif Ad Interim	Title	: Executive Director Ad Interim

Statement Letter of Management
On the responsibility for Financial Statements of
Yayasan TIFA
For the year ended
December 31st, 2022

I, the undersigned

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Yayasan TIFA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022	1. <i>I am responsible for the preparation and presentation of Yayasan TIFA's the financial statement for the years ended December 31st, 2022</i>
2. Laporan keuangan Yayasan TIFA telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; a. Semua informasi dalam laporan keuangan Yayasan TIFA telah dimuat dengan lengkap dan benar. b. Laporan keuangan Yayasan TIFA tidak mengandung informasi atau fakta yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.	2. <i>Yayasan TIFA's financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia; a. The information contained in the Yayasan TIFA's financial statements is complete and corrected; b. The Yayasan TIFA's financial statements do not contain any incorrect material information or fact, do not omit material information or fact.</i>
3. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Yayasan TIFA	3. <i>I am responsible for Yayasan TIFA's internal control system.</i>

Menyatakan Bahwa: *Hereby State that:*

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement is issued to the best of our knowledge and belief*

Jakarta, May 17th, 2023

Oslan Purba
Direktur Eksekutif Ad Interim / Executive Director Ad Interim

Aminta Plaza, 7th Floor # 701 Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan 12310 Indonesia
T: (+62 21) 766 1348-50 | F: (+62 21) 766 1351 | info@heliantonorekan.com | www.heliantonorekan.com
Branch: Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo

Registered Public Accountants

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report Number: 00614/2.0459/AU.1/11/0672-2/1/V/2023

Board of Trustee, Supervisors, and Directors

Opinion

We have audited the financial statements of Yayasan TIFA, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and statement of comprehensive income, statement of change in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Yayasan TIFA as of December 31, 2022 and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

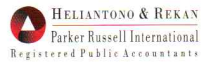
We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Yayasan TIFA in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter

Our audit was conducted for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole. The translation of the statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of cash flows, and notes to the financial statements to United States Dollar is presented for convenience of readers based on the basis set out in Note 3 and is not a required part of the basic financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such translation has been subjected to our auditing procedures and, in our opinion has been prepared, in all material respects, in accordance with the basis set out in Note 3.

00614/2.0459/AU.1/11/0672-2/1/V/2023

List of offices and partner's name are available at the above address. Heliantono & Rekan is a Registered Public Accountants in Indonesia licensed No. KEP-093/KM.6/2007. Heliantono & Rekan is a member of Parker Russell International a worldwide association of independent accounting firms and business advisors. Parker Russell International refers to the network of independent member firms of Parker Russell International Limited, each of which is a separated legal entity.



Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material statements, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Yayasan TIFA's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Yayasan TIFA or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Yayasan TIFA's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objective are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Yayasan TIFA's internal control.

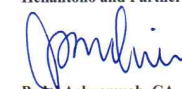
00614/2.0459/AU.1/11/0672-2/1/V/2023



- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Yayasan TIFA's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Yayasan TIFA to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Heliantono and Partner



Padri Achyarsyah, CA., CPA.
Public Accountant License No. AP.0672

May 17, 2023



00614/2.0459/AU.1/11/0672-2/1/V/2023

Yayasan TIFA
Statements of Financial Position
As of December 31, 2022

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

Notes	2022		2021	
	Rp	USD*)	Rp	USD*)
CURRENT ASSETS				
Cash and banks	4	60,493,208	3,845,478	15,969,177
Receivables from Donors	5	7,019,529	446,223	190,228
Advances and prepayment	6	587,616	37,354	341,210
		68,100,353	4,329,055	16,500,615
NON-CURRENT ASSETS				
Fixed assets	2g;7	10,436,468	663,433	11,353,246
		10,436,468	663,433	11,353,246
TOTAL ASSETS		78,536,821	4,992,488	27,853,861
CURRENT LIABILITIES				
Grant payables	2k;8	12,790,289	813,063	4,285,109
Payables to donors	2k;9	49,115,032	3,122,181	10,574,068
Accruals and other liabilities	2k;10	233,428	14,839	474,278
Taxes payable	2k;11	90,762	5,770	34,618
		62,229,511	3,955,853	15,368,073
NON-CURRENT LIABILITIES				
Grant payables	2k;8	-	-	-
NET ASSETS				
With restrictions from donor	2i	(556,373)	(36,489)	315,358
Without restrictions from donor	2i	16,863,683	1,169,003	12,170,430
Cumulative foreign currency translation differences		-	(95,879)	(91)
TOTAL NET ASSETS		16,307,310	1,036,635	12,485,788
TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS		78,536,821	4,992,488	27,853,861

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

Jakarta, May 17, 2023

Oslan Purba
Executive Director Ad Interim

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Yayasan TIFA
Statements of Comprehensive Income
For the year ended December 31, 2022

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

Notes	2022		2021	
	Rp	USD*)	Rp	USD*)
INCOME				
Contribution income	2d;12	11,662	785	3,037
Grant income from previous year	2d;13	1,251,122	84,537	326,800
Grant income from current year	15	39,886	2,608	10,480
Other income	15	571,809	35,513	1,385,427
		623,377	41,904	2,198,247
Total Income		623,377	41,904	2,198,247
EXPENSES				
Grant expenses	2d;16	(18,200,977)	(1,225,901)	(7,300,000)
Salaries and wages	17	(1,200,000)	(80,000)	(450,000)
Travel and transportation		(104,317)	(7,400)	(40,000)
Utilities		(2,378,866)	(164,317)	(1,000,000)
Printing and postage		(1,191,193)	(80,231)	(450,000)
Travelling expenses		(130,777)	(9,089)	(45,000)
Confidence and meeting		(873,385)	(58,861)	(300,000)
Utilities		(134,017)	(9,027)	(45,000)
Foreign exchange gain (loss), net		(1,049,975)	(70,662)	(350,000)
Employee allowances		(2,241,755)	(150,989)	(800,000)
Publication and printing		(78,560)	(5,158)	(25,000)
Office expenses		(158,848)	(10,521)	(50,000)
Office Supplies		(697,565)	(43,413)	(200,000)
Others		(76,892)	(5,179)	(25,000)
		4,223,375	284,460	1,900,000
Total Expenses		4,223,375	284,460	1,900,000
SURPLUS (DEFICIT)		201,002	13,444	298,247
Other comprehensive income				
NET ASSETS		16,307,310	1,036,635	12,485,788

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

Jakarta, May 17, 2023

Oslan Purba
Executive Director Ad Interim

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Yayasan TIFA
Statements of changes in net assets
For the year ended December 31, 2022

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

Notes	2022		2021	
	Rp	USD*)	Rp	USD*)
NET ASSETS WITHOUT RESTRICTIONS FROM DONOR				
Beginning balance:	12,170,430	852,896	11,803,402	821,035
Surplus (deficit), current year	4,693,253	316,107	367,028	25,690
Cummulative foreign currency translation difference - Beg	-	-	-	6,171
Net assets released from restriction	-	-	-	-
Ending balance	16,863,683	1,169,003	12,170,430	852,896
Other comprehensive Income				
Beginning balance	-	-	-	-
Other comprehensive Income, current year	-	-	-	-
Ending balance	-	-	-	-
TOTAL NET ASSETS WITHOUT RESTRICTIONS FROM DONOR	16,863,683	1,169,003	12,170,430	852,896
NET ASSETS WITH RESTRICTIONS FROM DONOR				
Beginning balance:	315,358	22,224	1,748,780	127,011
Surplus (deficit), current year	(871,731)	(58,713)	(1,433,422)	(100,334)
Cummulative foreign currency translation difference - Beg	-	-	-	(4,453)
Net assets released from restriction	-	-	-	-
Ending balance	(556,373)	(36,489)	315,358	22,224
Other comprehensive Income				
Beginning balance	-	-	-	-
Other comprehensive Income, current year	-	-	-	-
Ending balance	-	-	-	-
TOTAL NET ASSETS WITH RESTRICTIONS FROM DONOR	(556,373)	(36,489)	315,358	22,224
Current year	-	(95,879)	-	(91)
TOTAL CUMMULATIVE FOREIGN CURRENCY TRANSLATION DIFFERENCES	-	(95,879)	-	(91)
TOTAL NET ASSETS	16,307,310	1,036,635	12,485,788	875,029

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

Jakarta, May 17, 2023

Oslan Purba
Executive Director Ad Interim

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Yayasan TIFA
Statements of cash flows
As of December 31, 2022

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

Notes	2022		2021	
	Rp	USD*)	Rp	USD*)
Cash flows from operating activities				
Change in net assets	3,821,522	257,393	(1,066,394)	(74,644)
Add/(deduct) items not affecting the operating cash flows:				
Depreciation	7	1,051,715	70,837	1,026,170
Unrealized foreign exchange gain	(3,490,946)	(235,128)	(44,666)	(3,126)
Changes in assets and liabilities				
Receivables from donors	(6,829,301)	(432,891)	12,316,573	862,097
Advances and prepayments	(246,406)	(13,441)	(43,640)	(3,055)
Grant payables	8,505,180	512,754	(13,782,940)	(964,735)
Payables to donors	38,540,964	2,381,129	9,170,398	641,881
Accruals and other liabilities	(240,850)	(18,399)	(165,477)	(11,583)
Taxes payable	56,144	3,344	(3,308)	(232)
Deferred income	-	-	-	-
Non-current liabilities	-	-	(579,861)	(40,587)
Net cash flows provided from (used in) operating activities	41,168,022	2,525,598	6,826,855	477,843
Cash flows from investing activity				
Purchases of fixed assets	7	(134,937)	(8,578)	(82,981)
Net cash flows used in investing activity	(134,937)	(8,578)	(82,981)	(5,808)
Net increase (decrease) in cash and banks for the year	41,033,085	2,517,020	6,743,874	472,035
Cash and banks at the beginning of the year	15,969,177	1,119,151	9,180,637	650,878
Effect of exchange rate changes on cash and banks	3,490,946	235,128	44,666	3,126
Foreign currency translation differences	-	(25,821)	-	(6,888)
Cash and banks at the end of the year	60,493,208	3,845,478	15,969,177	1,119,151

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

Jakarta, May 17, 2023

Oslan Purba
Executive Director Ad Interim

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.



Bersama Tifa mendorong terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerja sama strategis dan pendekatan partisipatif dengan beragam pemangku kepentingan.

18th Office Park Building 15th Fl. Unit C-D T. B. No. 18 Pasar Minggu,
Jl. TB Simatupang, RT.2/RW.1, Kebagusan, Jakarta, DKI Jakarta, Jakarta 12520